

**PELAKSANAAN GADAI KEBUN KARET PADA  
MASYARAKAT JABIREN KECAMATAN JABIREN RAYA  
KABUPATEN PULANG PISAU MENURUT PANDANGAN  
EKONOMI ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh :

**ZULKIPLI RAHMAT**  
**NIM. 1402120353**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
JURUSAN EKONOMI ISLAM  
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
TAHUN 2018 M /1440 H**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : PELAKSANAAN GADAI KEBUN KARET PADA  
MASYRAKAT JABIREN KECAMATAN  
JABIREN RAYA KABUPATEN PULANG PISAU  
MENURUT PANDANGAN EKONOMI ISLAM


NAMA : ZULKIPLI RAHMAT  
NIM : 1402120353  
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
JURUSAN : EKONOMI ISLAM  
PROGRAM STUDI : EKONOMI SYARIAH  
JENJANG : STRATA SATU (S1)

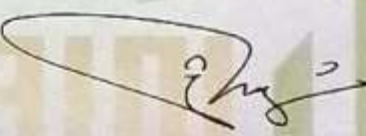
Palangka Raya, Oktober 2018

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


  
**Dra. Hj. RAHMANIAR, M.SI**  
NIP. 195406311981032001

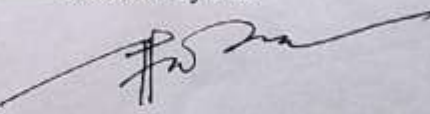
  
**SOFYAN HAKIM, M.M**  
NIDN. 2023018502

Mengetahui

Dekan Fakultas  
Ekonomi Dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi  
Ekonomi Syariah

  
**Dra. Hj. RAHMANIAR, M.SI**  
NIP. 195406311981032001

  
**ALI SADIKIN, M.SI**  
NIP. 197402011999031002

## NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**  
**Saudara Zulkipli Rahmat**

Palangka Raya, oktober 2018

Kepada  
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi  
IAIN Palangka Raya  
Di-  
Palangka Raya

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

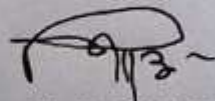
Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara :

Nama : **ZULKIPLI RAHMAT**  
Nim : **1402120353**  
Judul : **PELAKSANAAN GADAI KEBUN KARET PADA  
MASYRAKAT JABIREN KECAMATAN JABIREN  
RAYA KABUPATEN PULANG PISAU MENURUT  
PANDANGAN EKONOMI ISLAM**

Sudah dapat diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum wr. wb*

Pembimbing I



**Dra. Hj. RAHMANIAR, M.SI**  
**NIP. 195406311981032001**

Pembimbing II



**SOFYAN HAKIM, M.M**  
**NIDN. 2023018502**



## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **PELAKSANAAN GADAI KEBUN KARET PADA MASYRAKAT JABIREN KECAMATAN JABIREN RAYA KABUPATEN PULANG PISAU MENURUT PANDANGAN EKONOMI ISLAM**, Oleh Zulkipli Rahmat, NIM: 1402120353. Telah dimunaqasyahkan Tim Munaqasyah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

Hari : Kamis

Tanggal : 18 Oktober 2018 M

Palangka Raya, Oktober 2018

Tim Penguji :

1. Endriko Tedja Sukmana, M.SI

ketua sidang/penguji

2. ALI SADIKIN, M.SI

Penguji I

3. Dra. Hj. RAHMANIAR, M.SI

Penguji II

4. SOFYAN HAKIM, M.M

Sekretaris/penguji

Dekan Fakultas  
Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dra. Hj. RAHMANIAR, M.SI  
NIP. 195406311981032001

# **PELAKSANAAN GADAI KEBUN KARET PADA MASYARAKAT JABIREN KECAMATAN JABIREN RAYA KABUPATEN PULANG PISAU MENURUT PANDANGAN EKONOMI ISLAM**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pengamatan penulis tentang pelaksanaan gadai kebun karet yang ada di Jabiren Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau menurut pandangan Ekonomi Islam. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan gadai kebun karet, bagaimana akad perjanjian gadai kebun karet, dan bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan gadai kebun karet pada masyarakat Jabiren Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau.

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif Adapun objek penelitian yaitu kebun karet yang di gadaikan dan yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pegadai dan pihak yang menerima gadai. Untuk sumber data diambil dari sumber data primer dan sekunder. Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dari penelitian ini dihasilkan beberapa temuan bahwa gadai yang ada di Jabiren yang dominan di jadikan sebagai jaminan adalah kebun karet. Jaminan kebun karet tersebut dimanfaatkan atau di ambil hasilnya oleh si penerima gadai selama hutang pegadai belum dilunasi dengan jangka waktu yang tidak dibatasi, dengan implementasi yang sedemikian yang dibuat oleh para penerima gadai masyarakat masih tetap melakukan pegadaian walaupun mereka merasa dirugikan. Akad yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan syarat yang sudah ditentukan dalam akad *Rahn* akad tetapi pada saat pelaksanaan penggadai (*rahin*) merasakan dirugikan karena semua hasil kebun karet diambil sepenuhnya oleh penerima gadai (*murtahin*). Pandangan Ekonomi Islam terhadap pengambilan hasil atau manfaat barang jaminan kebun Karet oleh si penerima gadai (*murtahin*) sebahagian ulama membolehkan, Namun, harus ada izin dari (*rahin*), disyaratkan ketika akad. Dan menurut jumhur *fukah* berpendapat penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai. dan dari hasil penelitian penulis dilapangan jaminan kebun karet tersebut dimanfaatkan oleh penerima gadai hasilnya diambil sepenuhnya, dengan demikian merugikan sepihak dalam hal ini pandangan ekonomi Islam tidak boleh.

Kata Kunci : Pelaksanaan Gadai, Kebun Karet, akad gadai (*Rahn*) dan Pandangan Ekonomi Islam

**PAWNING IMPLEMENTATION OF RUBBER PLANTATION ACCORDING  
TO ISLAMIC ECONOMIC VIEW IN THE JABIREN SOCIETY, JABIREN  
RAYA DISTRICT, PULANG PISAU PISAU**

**ABSTRACT**

*This research was motivated by the author's observations about the implementation of pawn a rubber plantation in Jabiren Kecamatan Jabiren Raya Pulang pisau Regency, according to the view of Islamic Economics. Permasalahan in this study is how the implementation of pawn a rubber plantation, how the contract of pledge agreement rubber plantation, and how the view of Islamic economics towards the implementation of pawn a rubber plantation in the community of Jabiren Kecamatan Jabiren Raya Pulang pisau Regency.*

*The type of this research is qualitative research with a desscriptive approach. The research object is pawn rubber plantation, and the subject are the pawnshop and those who accept pawnshop. The data comes from primary and secondary data. In the data collection, the researcher uses observation, interview, and documentation.*

*From this study produced some findings that pawn in Jabiren dominant in use as a guarantee is a rubber plantation. The best garden rubber is utilized or take the result by the recipient of the pawn during the debt pegadai not yet repaid with the term of which is not restricted, with the implementation of such made by the recipient of the pawn community still do pawn shops even though they feel aggrieved. The contract that is carried out in accordance with the terms and conditions specified in the contract Rahn contract but at the time of the implementation of the penggadai (rahin) feel aggrieved because all the results of the rubber plantations taken up fully by the recipient of the pawn (murtahin). The view of Islamic Economics against the retrieval results or the benefits of the collateral Rubber plantation by the recipient's pawn (murtahin) some scholars allow, However, there must be permission from (rahin), required when the contract. And according to the majority of fuqaha argue the recipient of a pawn may not take the benefits of the items pawn. and from the results of the research the author field is the best rubber plantation is utilized by the recipient of the pawn the result is taken completely, thus detrimental to unilateral in this case the view of Islamic economics should not be.*

*Keywords : the Implementation of the Pawn, Rubber plantations, contract of pledge (Rahn) and the View of the Islamic Economy*



## KATA PENGANTAR

*Bissmillaahirrohmaanirrohiim*

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, yang hanya kepada-Nya kita menyembah dan kepada-Nya pula kita memohon pertolongan, atas limpahan taufiq, rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN GADAI KEBUN KARET PADA MASYARAKAT JABIREN KECAMATAN JABIREN RAYA KABUPATEN PULANG PISAU MENURUT PANDANGAN EKONOMI ISLAM”** dengan lancar. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penyelesaian tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa dorongan, bimbingan serta arahan yang diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ibnu AS. Pelu, SH, MH selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
2. Ibu Dra. Hj. Rahmaniar, M.S.I selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Palangka Raya dan sebagai dosen pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan dan saran kepada penulis selama penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan..

3. Ibu Itsla Yunisva Aviva, M.E.Sy selaku ketua prodi Ekonomi Islam di IAIN Palangka Raya.
4. Bapak Enriko Tedja Sukmana, S.Th.I selaku dosen penasehat akademik selama penulis menjalani perkuliahan.
5. Bapak Sofyan Hakim, MM sebagai dosen pembimbing II yang juga selalu membimbing penulis untuk memberikan arahan, pikiran dan penjelasan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan staf di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya yang selalu menginspirasi dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjalani perkuliahan dan membantu memberikan informasi terkait dengan penelitian.
7. Ayah dan Ibu penulis yang telah memberikan dukungan materil dan selalu mendoakan keberhasilan dan keselamatan penulis selama menempuh pendidikan.
8. Semua teman-teman program studi Ekonomi Syariah angkatan 2014 kelas C yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya penulis Semoga kiranya skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. *Amin Yaa Robbal Alamin.*

Palangka Raya, Oktober 2018  
Penulis,

**ZULKIPLI RAHMAT**  
**NIM. 1402120353**



## PERYATAAN ORISINALITAS

*Bismillahirrahmanirahim*

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul **“PELAKSANAAN GADAI KEBUN KARET PADA MASYARAKAT JABIREN KECAMATAN JABIREN RAYA KABUPATEN PULANG PISAU MENURUT PANDANGAN EKONOMI ISLAM”** benar karya ilmiah saya sendiri dan bukan hasil menjiplak dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari di temukan adanya pelanggaran, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangaka Raya, Oktober 2018

Penulis



Zulkipli Rahmat  
NIM.1402120353

## MOTTO

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (٨)

“Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikunya) dan janjinya.”

Qs. Al Mu'minun [23] : 8



## PERSEMBAHAN

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Atas Ridho Allah SWT. dengan segala kerendahan hati penulis karya ini saya persembahkan kepada*

- 1. Untuk Tuhanku Yang Maha Esa, yaitu Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, karunia serta kasih sayang dari Engkau, hambaMu yang dhaif ini dapat menyelesaikan tugas akhir ini, semoga hamba bisa selalu bersyukur atas semua kenikmatan yang telah diberikan. Apapun anugrah dan cobaan itu, semoga hamba selalu mengingat Mu dan selalu dekat dan menyayangi Tuhanku.*
- 2. Untuk ayah (Armansyah) dan ibuku (Ila), pemberi kontribusi terbesar dalam hidupku, yang selalu mendukung apapun yang dihadapi anakmu, trimakasih atas semua doa-doa yang dipanjatkan, trimakasih untuk kontribusi dana kehidupan, trimakasih atas semua kebaikan-kebaikan yang seujung kuku pun anakmu tidak bisa membalasnya, semoga kebaikan-kebaikan kalian menjadi amal jariyah dan pahala perjuangan jihad, semoga Ibu dan Ayah selalu dalam perlindungan Nya, selalu dalam dekapan kasih sayang Nya, semoga selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang, hingga dapat menyaksikan tumbuh kembangnya anak dan cucu-cucu Ibu dan ayah. I always love you Mamay & Babay. Kalian orangtua terbaik.*
- 3. Untuk my best brothers, Dedi hariyini, abang yang sangat saya sayangi, teruslah menjadi abang yang tangguh untuk adiknya, teruslah menjadi hot papa untuk anak-anaknya, teruslah menjadi suami terbaik untuk kakak iparku Kak Rahmaniah dan untuk adekku yang selalu dapat diandalkan dalam hal apapun semoga menjadi orang yang dapat membanggakan keluarga dengan pretasimu.*
- 4. Teruntuk malaikat-malaikat kecilku Muhammad Rafa Azka dan Muhammad Naufal Habibi. Trimakasih sudah menjadi pelipur laraku, penenang jiwaku, suatu hari kalian akan tau betapa aku sangat menyayangi kalian. Semoga kalian tumbuh menjadi anak yang sholeh dan selalu menjadi kesayangan Allah SWT.*

5. Untuk Sahabat-sahabatku, Nurhamid, wisdayansyah, Arfandi, ahmad fahrizal, hambrani, Muhammad Tarmizi, Ferry Porwanto, Siti Maryam, In Muyasaroh, Bella Mutiara Kasih, Septi Musdalifah, Meda Fitria, Tanti Yulianti dan Aliya Khairunisa trimakasih selama ini sudah bersedia kebersamai, menyemangati, mendoakan, trimakasih sudah menerima apapun kekuranganku, semoga kita menjadi sahabat sampe ke Syurga.
6. Untuk teman-teman seperjuangan Prodi Ekonomi Syariah kelas A, B, C angkatan 2014, semoga Allah SWT mencintai dan meridhoi perjuangan kita, semoga menjadi insan yang bertakwa, sukses dunia dan akhirat.
7. Untuk semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, trimakasih sudah turut memberikan kontribusi bantuan, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.





## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab tersebut dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z̤	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.....	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
---	Fathah	A	A
---	Kasroh	I	I
---	Dhommah	U	U

Contoh:

كَتَبَ : kataba

يَذْهَبُ : yazhabu

ذَكَرَ : zukira

سُئِلَ : su'ila

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ --اَ--	Fathah dan ya	Ai	a dan i
وَ --اَ--	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَؤُلَ : haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ --اَ-- اَ --اَ--	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يَ --اَ--	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وَ --اَ--	Ḍhommah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ : qāla

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَقُولُ : yaqūlu

#### **D. Ta Marbuṭah**

Transliterasi untuk *ta marbuṭah* ada dua, yaitu:

##### **1. Ta Marbuṭah hidup**

*Ta marbuṭah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan ḍamah, transliterasinya adalah /t/.

##### **2. Ta Marbuṭah mati**

*Ta marbuṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbuṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbuṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-aṭfāl  
raudatul-aṭfāl  
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : al-Madīnah al-Munawwarah  
al-Madīnatul-Munawwarah

#### **E. Syaddah (Tasydid)**

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu:

Contoh:



رَبَّنَا : rabbanā

الْبِرِّ : al-birr

نَزَّلَ : nazzala

الْحَجُّ : al-h}ajju

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال. Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariah*.

### 1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik yang diikuti huruf *Syamsiah* maupun huruf *Qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرَّجُلُ : ar-rajulu

الْقَلَمُ : al-qalamu

### G. Hamzah ( ء )

Telah dinyatakan di atas di dalam Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah*( ء )ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah*( ء )itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

*Hamzah* di awal:

أَمِرْتُ : umirtu

أَكَلَ : akala

*Hamzah* di tengah:

تَأْخُذُونَ : ta'khuḏūna

تَأْكُلُونَ : ta'kulūna

*Hamzah* di akhir:

شَيْءٌ : syai'un

النَّوْءُ : an-nau'u

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna  
Fa aufūl-kaila wal-mīzāna

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا : Bismillāhi majrēhā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasinya ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : Wa mā Muḥammadun illā rasūl  
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ : Syahru Ramaḍāna al-laẓī unẓila fīhi al-Qur'anū

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُمِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ : Naṣrum minallāhi wa faṭḥun qarīb  
لِلَّهِ : Lillāhi al-amru jamī'an  
الْأَمْرُ جَمِيعًا : Lillāhi amru jamī'an

Sumber : Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya*, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya Press, 2007

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ix
MOTTO .....	x
PERSEMBAHAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR ISTILAH .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian .....	5
E. Manfaat Penulisan .....	6
F. Sistematika Penulisan.....	6

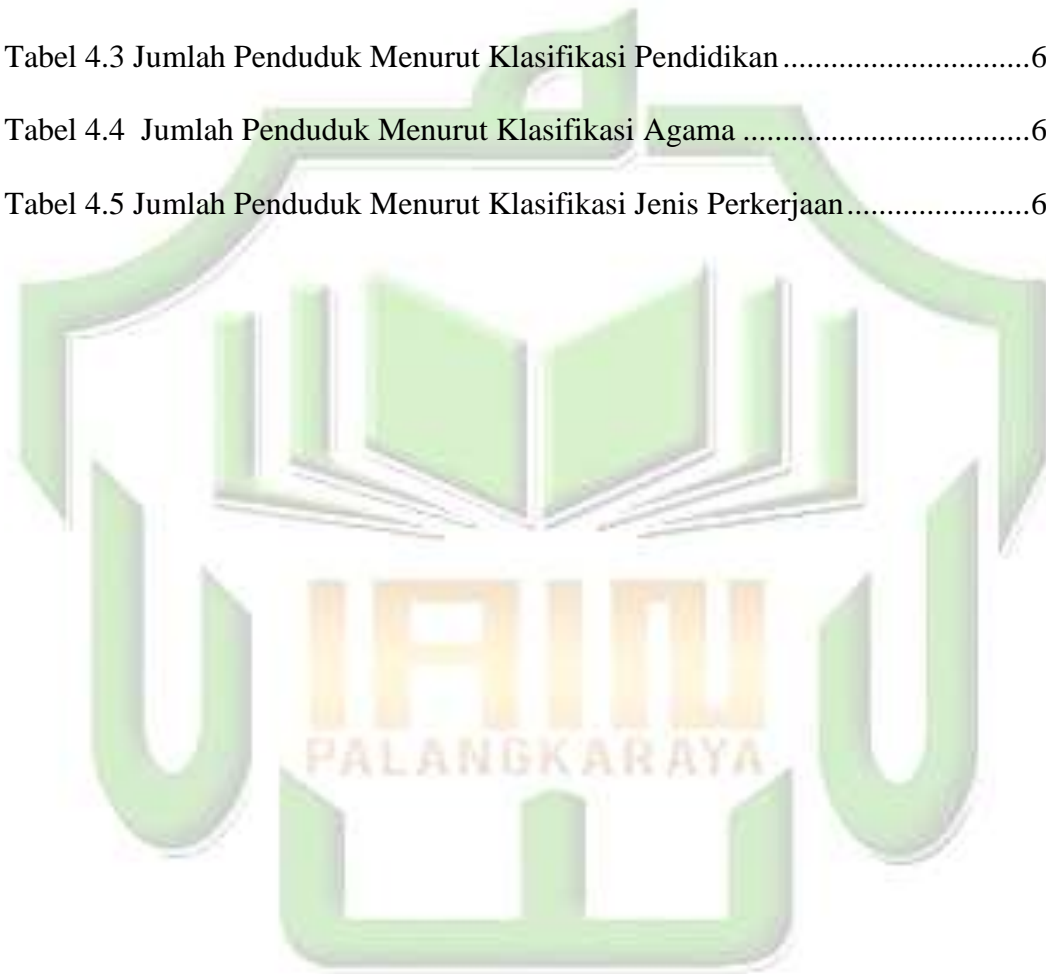


<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	8
B. Deskripsi Teori.....	19
1. Teori Tentang Pelaksanaan Gadai ( <i>Rahn</i> ) .....	19
a. Pengertian Pelaksanaan .....	19
b. Pengertian Gadai ( <i>Rahn</i> ) .....	20
2. Dasar Hukum Gadai dan Hukum Gadai .....	22
a. Dasar Hukum Gadai .....	22
b. Hukum Gadai ( <i>Rahn</i> ) .....	28
3. Pelaksanaan gadai ( <i>Rahn</i> ) .....	28
a. Ketentuan Umum Pelaksanaan Rahn dalam Islam.....	28
b. Rukun dan Syarat Gadai.....	31
c. Hak dan kewajiban pihak yang berakad.....	35
d. Pengambilan Manfaat Barang Gadai.....	37
e. Riba dan gadai .....	44
4. Pandangan Islam Tentang Pelaksanaan Gadai.....	45
a. Prinsip Dasar Ekonomi Islam.....	45
b. Padangan Ekonomi Islam Tentang Gadai ( <i>Rahn</i> ).....	46
C. Kerangka Berpikir.....	48
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>49</b>
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	49
B. Metode dan Alasan Menggunakan Metode .....	49
C. Objek dan Subjek Penelitian.....	50
D. Teknik Pengumpulan Data.....	52
1. Observasi.....	52

2. Wawancara.....	53
3. Dokumentasi .....	54
E. Pengabsahan Data .....	55
G. Analisis Data.....	56
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>58</b>
A. Gambaran Umum Desa Jabiren kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau.....	58
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	63
1. Pelaksanaan Gadai Kebun Karet pada Masyarakat Jabiren Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau .....	63
2. Akad Perjanjian Gadai Kebun Karet pada Masyarakat Jabiren Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau .....	78
3. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap penerapan dan pelaksanaan Gadai Kebun Karet pada Masyarakat Jabiren Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau.....	79
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan .....	89
B. Saran.....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	17
Tabel 3.1 Subjek Penelitian.....	53
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Klasifikasi Kelompok Umur.....	59
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Klasifikasi Jenis Kelamin .....	60
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Klasifikasi Pendidikan .....	60
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Menurut Klasifikasi Agama .....	61
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Menurut Klasifikasi Jenis Pekerjaan.....	62



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Stuktur kerangka berpikir Penelitian.....	48
--	----





## DAFTAR ISTILAH

<i>Aqid</i>	: Orang yang Berakad
<i>Aqil</i>	: Seseorang yang telah masa baligh dan memiliki akal sehat
<i>Borg</i>	: Jaminan
<i>Fidusia</i>	: Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
<i>Ghashab</i>	: Mengambil segala sesuatu secara zhalim
<i>Habsu</i>	: Menahan barang gadai
<i>Ijarah</i>	: Biaya Penitipan/Penyimpanan Barang/Jasa Simpan
<i>Ijtihad</i>	: Orang yang berpikir dengan sungguh-sungguh dalam menetapkan hukum syariat
<i>Ijma'</i>	: Kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum
<i>Ijab</i>	: Pernyataan Menyerahkan Sesuatu
<i>Irsyad</i>	: Anjuran baik
<i>Jaiz</i>	: Boleh diubah
<i>Life Story</i>	: Sejarah kehidupan
<i>Marhun</i>	: Barang yang digadaikan
<i>Mahbusah</i>	: Harta yang tertahan
<i>Ma'qud Alaih</i>	: Barang yang diakadkan
<i>Murtahin</i>	: orang yang berpiutang dan menerima barang gadai

<i>Mu'awwadah</i>	: Pertukaran
<i>Muamalah</i>	: Hubungan manusia dalam berinteraksi sosial sesuai dengan syariat
<i>Mumayyiz</i>	: seorang anak yang telah memasuki perkembangan otak dan fisik dalam tahap sempurna, namun belum dalam keadaan benar-benar sempurna karena belum Baligh.
<i>Qabul</i>	: Pernyataan menerima sesuatu
<i>Qiradh</i>	: Pemberian modal usaha dengan harapan mendapatkan keuntungan dari perjanjian bersama
<i>Rahn</i>	: Gadai syriah
<i>Rahin</i>	: orang yang menggadaikan barangnya
<i>Sanda/manyanda</i>	: Gadai yang digunakan dalam bahasa dayak
<i>Sighat</i>	: Lafazd ijab qabul
<i>Syara'</i>	: Ketentuan dan aturan yang bersifat mengikat bagi umat Islam
<i>Tabarru</i>	: Tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan
<i>Wakalah</i>	: Pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain selaku pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Didalam hidup ini, ada kalanya orang mengalami kesulitan pada suatu ketika. Untuk menutupi (mengatasi) kesulitan itu terpaksa meminjam uang kepada pihak lain, apakah kepada rumah penggadaian atau kepada perorangan. Pinjaman itu harus disertai dengan jaminan (koleteral).<sup>1</sup>

Gadai (*al-Rahn*) merupakan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana, *Rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.<sup>2</sup>

Pemegang barang gadai tidak dibenarkan menggunakan barang gadai kecuali dengan izin orang yang menyerahkan barang gadai (pemilik barang), dimaksud untuk menjaga jangan sampai pihak orang yang menyerahkan barang gadai dirugikan, sebab sebagai pemilik, orang yang menyerahkan barang gadailah yang berhak menikmati hasil-hasil tambahan yang terjadi pada barang gadai selama ada di tangan pemegang barang gadai. Untuk menjaga supaya tidak ada pihak yang dirugikan, dalam gadai tidak boleh diadakan syarat-syarat, misalkan ketika akad gadai diucapkan, “Apabila si *rahin* tidak mampu melunasi utangnya

---

<sup>1</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam ( Fiqh Muamalat )*, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2003. h,253.

<sup>2</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2008. h,262.

hingga waktu yang telah ditentukan, maka *marhun* menjadi milik *murtahin* sebagai pembayaran utang”, sebab ada kemungkinan pada waktu pembayaran yang telah ditentukan untuk membayar utang harga *marhun* akan lebih kecil daripada utang *rahin* yang harus dibayar yang mengakibatkan ruginya pihak *murtahin*. Sebaliknya ada kemungkinan juga harga *marhun* pada waktu pembayaran yang telah ditentukan akan lebih besar jumlahnya daripada utang yang harus dibayar, yang akibatnya akan merugikan pihak *rahin*.<sup>3</sup>

Sedangkan yang terjadi dilapangan praktek gadai yang dilakukan seperti perpindahan hak milik dimana orang yang menerima gadai berhak memanfaatkan hasil yang didapat dari barang tersebut yang berupa getah karet. Kebanyakan pelaksanaan gadai ini terjadi karena kebutuhan Ekonomi yang mendesak seperti biaya berobat, biaya sekolah dan keadaan lain yang membutuhkan uang dalam waktu cepat. Biasanya uang yang dapat diterima dari penggadaian kebun karet tergantung dari hasil kebun karet yang digadaikan sebagai jaminan. Pada umumnya kebun karet yang dapat menghasilkan 15-20 Kg perhari maka kebun karet tersebut dapat dihargai sebesar 3-6 juta dalam jangka waktu 1 tahun. Sedangkan untuk kebun karet yang menghasilkan 20-30 Kg dapat dihargai 5-10 juta akan tetapi semua itu tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan akad gadai kebun karet tersebut. Dalam proses akadnya pun hanya saling percaya dengan ucapan tanpa adanya surat perjanjian antara keduanya dan juga pada saat

---

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2005. h, 110

penjanjian tersebut maka kebun karet yang digadaikan sudah dapat di terima oleh si penerima gadai tersebut.<sup>4</sup>

Melihat dari uraian yang telah dikemukakan di atas kemudian memperhatikan fenomena-fenomena yang terjadi di Jabiren Kecamatan Jabiren Raya dimana dalam masyarakat kita, ada cara gadai yang hasil barang gadaian itu, langsung dimanfaatkan oleh pemegang gadai (orang yang memberi piutang). Banyak terjadi, terutama di desa-desa, bahwa sawah dan kebun yang digadaikan langsung dikelola oleh pegadai dan hasilnya pun sepenuhnya dimanfaatkannya ada juga sawah atau kebun yang dijadikan jaminan itu, diolah oleh pemilik sawah atau kebun itu, tetapi hasilnya dibagi antara pemilik dan pemegang gadai. Seolah-olah jaminan itu milik pemegang gadai selama piutangnya belum dikembalikan.

Pada dasarnya pemilik barang seperti Kebun Karet , dapat mengambil manfaat dari dari Kebun Karet itu, berdasarkan sabda Rasulullah Saw:

لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ  
(روالشافعي والداقطنى)

Jaminan itu tidak menutupi yang punya dari manfaat barang barang (yang digadaikan) itu, faedahnya kepunyaan dia, dan dia (juga) wajib memikul beban (pemeliharaan).” (HR.al-Daruquthni dan al-Hakim).<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Hasil Wawancara dengan Petani Kebun Karet yang menerima Gadai yaitu Ibu IL. Tanggal 31 April 2018.

<sup>5</sup> H. Idri, *Hadis Ekonomi ( Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi )*, Jakarta: Kencana. 2015. h.212.



Kendatipun pemilik barang (jaminan) boleh memanfaatkan hasilnya, tetapi dalam beberapa hal dia tidak boleh bertindak untuk menjual, mewakafkan atau menyewakan barang jaminan itu, sebelum ada persetujuan dari pemegang gadai.

Salah satu akibat dari pegadaian dengan jaminan kebun karet tersebut adalah si pegadai tidak mendapat sedikitpun hasil dari jaminan kebun karetnya sementara kebun itu dimanfaatkan oleh si penerima gadai selama hutang belum lunas bahkan kurangnya perawatan dari penerima gadai terhadap kebun karet seperti dikala hujan masih mereka manfaatkan sementara itu memanfaatkan kebun karet dikala hujan berdampak negative (tidak produktif) terhadap kebun tersebut. Penerima gadai (*murtahin*) terhadap barang jaminan kebun karet tersebut bukan menjadikannya sebagai jaminan semata-mata melainkan kebun karet diambil hasilnya, layaknya seperti milik sendiri atau seperti sudah dijual.<sup>6</sup>

Persoalan di sini adalah pengambilan hasil atau manfaat kebun karet yang digadaikan oleh si pegadai. Kalau ditinjau kembali dan dihitung-hitung serta diperbandingkan hasil yang didapat dari karet tersebut selama digadaikan melebihi dari hutangnya. Dengan demikian bisa merugikan satu pihak.

Memperhatikan kasus dan implementasi pegadaian yang terjadi yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut dengan melakukan penelitian secara ilmiah dengan judul: ***“Pelaksanaan Gadai Kebun Karet Pada Masyarakat Jabiren Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Menurut Pandangan Ekonomi Islam”***.

---

<sup>6</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003 h, 256-257.

## **B. Fokus Penelitian**

Agar penelitian lebih terarah karena begitu banyak sistem pegadaian yang ada, maka permasalahan dibatasi hanya membahas tentang pelaksanaan gadai kebun karet pada Masyarakat Jabiren Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau.

Sehingga peneliti ingin mengetahui apakah pelaksanaan gadai kebun karet secara syariah sudah dijalankan. Akad yang digunakan masyarakat dalam pelaksanaan gadai kebun karet yang mereka lakukan. Dan juga bagaimana pandang ekonomi Islam perihal pelaksanaan gadai kebun karet.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan diatas, penulis merumuskan masalah dalam proposal ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Gadai Kebun Karet pada Masyarakat Jabiren Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau ?
2. Bagaimana Akad Perjanjian Gadai Kebun Karet pada Masyarakat Jabiren Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau ?
3. Bagaimana Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Kebun Karet pada Masyarakat Jabiren Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau ?

## **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini yang diteliti adalah :

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Gadai Kebun Karet pada Masyarakat Jabiren Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau.

2. Untuk Mengetahui Akad Perjanjian Gadai Kebun Karet pada Masyarakat Jabiren Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau
3. Untuk Mengetahui Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Kebun Karet pada Masyarakat Jabiren Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau.

#### **E. Manfaat Penulisan**

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat Jabiren Raya perihal pelaksanaan Gadai Kebun Karet yang sesuai Syari'at Agama Islam.
2. Untuk menambah wawasan penulis dan sebagai sumbangsih penulis dalam mengembangkan disiplin Ilmu guna pengembangan Ilmu pengetahuan.
3. Untuk memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi.

#### **F. Sistematika Penulisan**

##### **BAB I Pendahuluan**

Membahas mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

##### **BAB II Kajian pustaka**

Bab ini memaparkan penelitian terdahulu, deskripsi teoritik yang menerangkan tentang masalah Gadai Kebun Karet yang diteliti yang akan menjadi landasan teori atau kajian teori dalam penelitian, kemudian dibuat kerangka konsep dan kerangka pemikiran agar lebih tersusun dan terarah.

##### **BAB III Metode penelitian**

Bab ini menjelaskan mengenai waktu dan lokasi penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, objek dan subjek penelitian, metode

pengumpulan data, pengabsahan data dan analisis data agar data yang diperoleh benar-benar dapat dipercaya.

#### BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini membahas tentang hasil penelitian berupa analisis data yang telah diteliti dan pembahasan berupa jawaban dari rumusan masalah yaitu tentang Pelaksanaan Gadai Kebun Karet Pada Masyarakat Jabiren Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Menurut Pandangan Ekonomi Islam.

#### BAB V Kesimpulan dan Saran

Bab ini membahas tentang memuat kesimpulan terhadap permasalahan yang dikemukakan pada penelitian, kemudian diakhiri dengan saran-saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepannya.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui beberapa hasil dari penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat diperlukan dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Penelitian terdahulu relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas oleh penulis perlu dijadikan acuan tersendiri. Pada hal ini, fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah hal terkait dengan masalah gadai yang terjadi pada masyarakat yang tidak terkait dengan forum pegadaian

Berdasarkan permasalahan tentang penelitian mengenai Gadai, maka penulis memiliki acuan terhadap penelitian yang dilakukan oleh

1. Desi Astarina (2014) mengenai “*Penerapan Akad Rahn Dalam Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah Di Kota Palangka Raya*” investasi emas adalah trend baru dalam dunia investasi yang mereka geluti oleh para investor emas. Maraknya investasi emas dalam perekonomian khususnya di kota Palangka Raya membuat pegadaian syariah cabang palangkaraya berinisiatif meluncurkan produk investasi emas yaitu produk mulia. Penelitian ini berfokus kepada penerapan akad *Rahn* dalam investasi emas pada pegadain syariah cabang palangka raya jl. Dr.Murdjani kota Palangka Raya. Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini ialah: apa yang melatar belakangi pegadaian syariah menggunakan akad *Rahn* dalam invests emas? Dan selanjutnya bagaimana pelaksanaan akad *Rahn* investasi



emas dalam praktek pegadaian syariah? Terakhir apakah investasi emas dengan akad *Rahn* sesuai dengan perspekti ekonomi Islam?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, sehingga metode yang digunakan adalah metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari pimpinan cabang pegadaian syariah dan karyawan. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dengan koleksi data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penggunaan akad *Rahn* dalam investasi emas menyesuaikan sistem operasional pegadaian syariah yang bergerak di jasa gadai dan fidusia sehingga segala transaksi yang diselenggarakan oleh pegadaian syariah harus berdasarkan akad gadai (*ar-Rahn*). Secara garis besar sistem aktivitas yang dilakukan oleh pegadaian syariah dalam produk investasi emas tidak menyalahi aturan sebab dalam kegiatan operasionalnya memiliki landasan yang jelas dan kuat yaitu berlandaskan Al-qur'an dan Hadist, pegadaian syariah juga memiliki acuan yaitu AD/ART perusahaan yang termuat dalam core bisnis pasal 3 ayat 2 dan pasal 3 ayat 3, fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002, No. 26/DSN-MUI/III/2002. No. 77/DSN-MUI/V/2010 dan menyesuaikan Prinsip Ekonomi Islam.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Desi Astarina, “Penerapan Akad *Rahn* Dalam Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah Di Kota Palangka Raya,” Skripsi Sarjana Palangka Raya: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2014, h. vii, t.d.

2. Munir (2014) mengenai "*PRAKTEK GADAI SAWAH DAN IMPLIKASI SOSIAL EKONOMI (Studi Kasus di Desa Juruan Daya Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep Madura)*" Rahn atau gadai merupakan salah satu bentuk akad *tabarru* (sukarela), yaitu sebuah akad yang tujuan utamanya adalah untuk menolong dan membantu kesulitan orang lain. Dan bukan merupakan akad *profit* atau usaha mencari keuntungan. Namun, yang terjadi adalah ada oknum-oknum yang memanfaatkan praktek gadai adalah untuk kepentingan profit sehingga esensi transaksi gadai sebagai bentuk tolong menolong tidak lagi menjadi acuan mereka. Hal ini yang terjadi di Desa Juruan Daya Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep. Dimana yang terjadi desa tersebut terdapat praktek gadai sawah yang barang jaminannya dimanfaatkan langsung oleh penerima gadai. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan kegiatan praktek gadai tanah sawah, untuk menjelaskan hubungan sosial serta untuk menjelaskan status hukum gadai tanah sawah yang terjadi di Desa Juruan Daya Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep Madura. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif diskriptif dengan pendekatan fenomenologi dan studi kasus. Teknik analisis data yang digunakan dimulai dari *Data Reduction*, *Data Display* dan *Conclusion drawing/verification*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara proses praktek gadai sawah yang terjadi di Desa Juruan Daya Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep berjalan dengan baik, termasuk hubungan sosial yang terjalin diantara mereka juga berjalan dengan baik. Hal ini mempunyai implikasi

ekonomi dan sosial terhadap aktivitas masyarakat di Desa tersebut. Sebagai dampak ekonomi praktek gadai yang terjadi mempunyai peranan yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian karena uang pinjaman yang didapatkan dari gadai dapat dimanfaatkan oleh mereka untuk kepentingan buka usaha yang lebih berpotensi selain itu uang pinjaman dapat dimanfaatkan oleh mereka untuk biaya pendidikan anak-anak mereka. Sebagai dampak sosial praktek gadai sawah tidak begitu mempengaruhi terhadap kehidupan dan aktivitas mereka karena mereka berada dalam sebuah budaya yang selalu mempererat mereka. Sedangkan secara hukum praktek gadai sawah yang terjadi masih belum sesuai dengan syariat Islam.<sup>8</sup>

3. Mutawaddiah (2016) mengenai *“Pelaksanaan Gadai Tanah dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Bajiminasa Bulukumba”* Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem pelaksanaan gadai tanah (sawah) pada masyarakat Desa Bajiminasa Bulukumba? Dan bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan gadai tanah (sawah) pada masyarakat Desa Bajiminasa Bulukumba?

Metode dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif. Dengan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis.

---

<sup>8</sup>Munir, *“PRAKTEK GADAI SAWAH DAN IMPLIKASI SOSIAL EKONOMI (Studi Kasus di Desa Juruan Daya Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep Madura)”* Skripsi Sarjana Malang: Universitas Brawijaya Malang, 2014, h. vii, t.d..

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pelaksanaan gadai tanah (sawah) di Desa Bajiminasa Bulukumba dilakukan sejak dahulu dengan alasan persoalan ekonomi. Dan bila dilihat dari rukun dan syarat gadai sudah terpenuhi. Akan tetapi, dilihat dari segi *sighat* (penentuan batas waktu) yang tidak dipermasalahkan. Sehingga mengakibatkan hak dan kewajiban gadai dalam ekonomi Islam belum terpenuhi sepenuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Gadai Tanah dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Bajiminasa Bulukumba belum sepenuhnya sesuai dengan ekonomi Islam.

Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Hendaklah para pemuka masyarakat dalam hal ini adalah para ulama setempat, agar lebih sering memberikan pengarahan atau informasi mengenai pelaksanaan gadai yang sesuai dengan ekonomi Islam dan tentang cara-cara bermuamalah secara baik dan benar sehingga masyarakat dapat terhindar dari kesalahan. 2) Kepada *Rahin* dan *Murtahin*, selain kepercayaan yang mereka miliki bersama. Hendaknya dalam bertransaksi gadai tanah (sawah) menggunakan catatan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dibawah notaris sebagai bukti otentik jika diantara mereka terjadi perselisihan. 3) Hendaknya dalam bertransaksi gadai tanah (sawah) selain melibatkan pihak ketiga (saksi) juga melibatkan pihak pemerintah seperti kepala desa dan mengarsipkannya. Agar dikemudian hari, apabila terjadi perselisihan lebih mudah menyelesaikannya. 4) Sebagai bahan pembelajaran atau ilmu

pengetahuan yang dapat diterapkan oleh pembaca dalam melaksanakan gadai khususnya gadai tanah (sawah).<sup>9</sup>

4. Dina Amalia Hidayati (2016) mengenai “*Pemanfaatan Gadai Tanah Sawah di Desa Sruwen Kec.Tengaran, Kab.Semarang Menurut Hukum Islam*”

Penelitian ini merupakan upaya untuk meneliti kegiatan pemanfaatan Gadai Tanah sawah di Desa Sruwen, Kec.Tengaran, Kab.Semarang. Pertanyaan yang perlu dijawab dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana praktek pemanfaatan gadai tanah sawah di desa Sruwen Kec.Tengaran Kab.Semarang?, (2) Bagaimana status hukum pemanfaatan gadai tanah sawah di desa Sruwen Kec.Tengaran Kab.Semarang menurut hukum Islam?. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan deskriptif analitis yaitu dengan menggambarkan kegiatan yang terjadi kemudian dianalisis dengan teori yang mendukung. Dengan penelitian ini bisa menambah wawasan keilmuan tentang Ekonomi Syariah dalam hal gadai tanah sawah dan bisa menjadi bahan sosialisai untuk masyarakat secara umum. Serta bisa menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya tentang gadai tanah sawah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*, gadai tanah di desa sruwen adalah meminjam uang dengan menggadaikan tanah sawah,

---

<sup>9</sup> Mutawaddiah, “*Pelaksanaan Gadai Tanah dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Bajiminasa Bulukumba*” Skripsi Sarjana Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2016, h. vii, t.d..



dalam jangka waktu yang telah disepakati atau selama belum bisa melunasi tanah sawah digarap oleh penerima gadai atau pemilik uang, apabila sampai jangka waktu yang disepakati pemilik sawah belum bisa melunasi hutangnya maka hasil dari sawah tersebut tetap menjadi hak penerima gadai atau pemilik uang . *Kedua*, menurut hadis nabi yang telah ditelaah oleh ulama Syafiiyah bahwa penerima gadai tidak berhak atas manfaat dari barang gadai. Seperti yang telah dijelaskan nabi dalam sebuah hadis bahwa utang yang menarik manfaat adalah riba. Dan riba hukumnya adalah haram. Jadi memanfaatkan barang gadai oleh penerima gadai hukumnya haram.<sup>10</sup>

5. Riko Rahman (2018) "*Praktik "Manyanda" Kebun Karet Masyarakat Bakumpai Di Desa Muara Sumpoi Ditinjau Dalam Ekonomi Islam*" penelitian ini dilakukan untuk memaparkan praktik *manyanda* kebun karet masyarakat Bakumpai di Desa Muara Sumpoi. Dengan rumusan masalahnya yaitu: bagaimana proses pelaksanaan *manyanda* kebun karet pada masyarakat Bakumpai di Desa Muara sumpoi? Dan bagaimana pandangan Ekonomi Islam terhadap proses pelaksanaan *menyanda* kebun karet masyarakat Bakumpai di desa Muara Sumpoi?.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan menggunakan metode kualitatif deskriptif, adapun subjek penelitian ini adalah *rahin*/pemberi barang jaminan dan *murtahin*/penerima barang jaminan. Teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan

---

<sup>10</sup>Dina Amalia Hidayati, "*Pemanfaatan Gadai Tanah Sawah di Desa Sruwen Kec.Tengaran, Kab.Semarang Menurut Hukum Islam*" Skripsi Sarjana Semarang: Institut Agama Islam Negeri, 2016, h. vii, t.d..

dokumentasi. Teknik pengabsahan data menggunakan *triangulasi* sumber dengan mengumpulkan data dan informasi sejenis dari berbagai sumber yang berbeda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan *manyanda* kebun karet masyarakat Bakumpai di Desa Muara Sumpoi dilakukan sejak dahulu dengan alasan persoalan ekonomi. *Manyanda* hanya dilakukan secara lisan dan tidak ada penyerahan dokumen asli kepemilikan dari pihak *rahin*, yaitu pihak *rahin* menawarkan kebun karetnya kepada *murtahin* untuk dijadikan jaminan dengan maksud untuk memperoleh pinjaman berupa uang, dari pertemuan tersebut *rahin* dan *murtahin* mengadakan kesepakatan atau akad, dimana barang jaminan dimanfaatkan atau diambil hasilnya oleh pihak *murtahin*. Adapun pandangan ekonomi Islam bila dilihat dari akad kemudian rukun dan syarat *rahn* sudah terpenuhi. Akan tetapi, dilihat dari segi *sighat* (penentuan batas waktu) yang tidak dipermasalahkan dan ini yang menyebabkan hutang piutang yang terjadi dalam waktu lama, pengambilan manfaat dari barang jaminan boleh saja dilakukan karena itu dalam kesepakatan awal dalam berakad. Akan tetapi yang terjadi dalam *menyanda* ini, hutang ini berlarut-larut sehingga terjadi, hasil dari kebun karet atau manfaatnya lebih besar dari hutang awal. Akan tetapi semua pihak perlu memegang prinsip keadilan, prinsip keadilan

dalam ekonomi Islam yaitu adil berarti seseorang harus diperlakukan atas dasar kekeluargaan atau saling tolong menolong.<sup>11</sup>

Penelitian ini mengangkat judul tentang :“Pelaksanaan Gadai Kebun Karet Pada Masyarakat Jabiren Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Menurut Pandangan Ekonomi Islam” Jadi, karena yang menjadi objek dan subjek metode dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu sehingga rumusan masalah yang akan dibahas juga berbeda.



---

<sup>11</sup> Riko Rahman, *Praktek “Manyanda” kebun karet Masyarakat Bakumpai Di Desa Muara Sumpoi Ditinjau dalam Ekonomi Islam*”, Skripsi Sarjana Palangka Raya: Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2018, h. vii, t.d..

**Tabel 2.1**  
**PENELITIAN TERDAHULU**

No	Peneliti	Judul	Perbedaan	Persamaan
1	Desi Astarina (2014)	“Penerapan Akad Rahn Dalam Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah Di Kota Palangka Raya”	Perbedaan yaitu dimana penelitian ini mengenai lembaga keuangan pegadaian sedangkan saya menggunakan system gadai perorangan dan juga pada objek yaitu penelitian ini menggunakan emas sebagai objek sedangkan saya menggunakan kebun karet sebagai objek gadai.	Persamaan yaitu pada metode penelitian kualitatif diskriptif dengan pendekatan fenomenologi dan studi kasus.
2	Munir 2014	Praktek Gadai Sawah Dan Implikasi Sosial Ekonomi (Studi Kasus Di Desa Juruan Daya Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep Madura)	Penelitian ini menggunakan sawah sebagai objek gadai sedangkan menggunakan kebun karet sebagai objek penelitian dan juga ini menggunakan sosial ekonomi sebagai pembahasan penelitiannya sedangkan saya lebih mengarah dalam pandangan ekonomi Islam.	Penelitian ini sama-sama menggunakan metode kualitatif diskriptif dengan pendekatan fenomenologi dan studi kasus.
3	Mutawadiah 2016	Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam Perspektif Ekonomi	Perbedaan penelitian ini terletak pada objek gadai yaitu dimana penelitian ini	Persamaan yaitu menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data menggunakan

		Islam Di Desa Bajiminasa Bulukumba	menggunakan tanah sedangkan saya kebun karet dan juga metode deskriptif analisis sedangkan metode sayayaitu pendekatan fenomenologi dan studi kasus.	wawancara, dokumentasi dan observasi. Dan juga membahas tentang sistem dan pandangan ekonomi Islam dalam system gadai.
4	Dina Amalia Hidayati 2016	Pemanfaatan Gadai Tanah Sawah Di Desa Sruwen, Kec. Tengaran, Kab. Semarang Menurut Hukum Islam	Terletak pada objek gadai yang mana saya menggunakan kebun karet sebagai objek penelitian dan juga penelitian ini mengarah pada hukum Islam sedangkan penelitian saya mengarah pada pandangan ekonomi Islam.	Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif dan saya juga menggunakan metode yang sama dengan penelitian ini dan juga membahas tentang pemanfaatan barang gadai.
5	Riko Rahman 2018	Praktek “ <i>Manyanda</i> ” kebun karet Masyarakat Bakumpai Di Desa Muara Sumpoi Ditinjau dalam Ekonomi Islam	Penelitian ini hanya membahas tentang proses pelaksanaan <i>manyanda</i> kebun karet dan pandangan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan <i>manyanda</i> sedang penelitian saya tidak hanya mengangkat dua hal diatas tetapi juga membahas tentang akad perjanjian yang dilakukan	Tujuannya dan maksud penelitian hapir sama semua dari metode objek dan subjek dan beberapa rumusan masalah

Di Buat oleh Penulis 2018



## B. Deskripsi Teori

### 1. Teori Tentang Pelaksanaan Gadai (*Rahn*)

#### a. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.<sup>12</sup>

Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dimulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2002. hal. 70

<sup>13</sup> Abdullah Syukur, *Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan*, Persadi, Ujung Pandang.1987.. Hlm 40

### b. Pengertian Gadai (*Rahn*)

Kata gadai atau dalam istilah fiqhnya adalah *Rahn* ialah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis.<sup>14</sup> Menurut bahasa *Rahn* berarti *al-tsubut* dan *al-babs* yaitu penetapan dan penahanan.<sup>15</sup> Secara syara *Rahn* adalah menyendera sejumlah harta yang diserahkan sebagai sebuah jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan.<sup>16</sup> Dengan demikian, pihak yang menahan atau menerima gadai atau murtahin memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.<sup>17</sup>

Adapun secara istila ada beberapa pengertian *Rahn* yaitu :

- 1) Pengertian *Rahn* menurut Wahbah az-Zuhaili, adalah menahan sesuatu dengan hak yang memungkinkan untuk mengambil manfaat darinya.
- 2) Pengertian *Rahn* menurut Sayyid Sabiq, adalah menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara' sebagai jaminan atas hutang selama masih ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu.
- 3) Pengertian *Rahn* menurut Taqiyuddin, adalah menjadikan harta sebagai jaminan.

---

<sup>14</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h.262.

<sup>15</sup> Hendi Suhendi, *fiqh Muamalah*, ... h. 105.

<sup>16</sup> Muhammad Firdaus dkk, *Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah*, Jakarta: Renaisans, 2005, h. 15.

<sup>17</sup> Salsi Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kejadian Kontemporer)*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2005, h.38.

Secara umum *Rahn* dapat didefinisikan yaitu menjadikan suatu benda yang bernilai (menurut *syara'*) sebagai penguat hutang yang dapat dijadikan pembayaran seluruh atau sebagian hutangnya dengan menjual atau memiliki benda tersebut. Sebagai contoh seorang menyerahkan sebidang tanah atau hewan sebagai agunan (jaminan) yang diletakan dibawah kekuasaan yang berpiutang sampai dia dapat membayar hutangnya. Kerena dalam proses ini *fiqh* mu'amalah perbuatan tersebut disebut *Rahn*. Sedangkan orang yang mempunyai barang (yang berhutang) disebut *rahim* dan pihak yang mengambil barang agunan (yang berpiutang) disebut *murtahim*.<sup>18</sup>

Pengertian gadai yang terungkap dalam Pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas sesuatu barang bergerak, yaitu barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai hutang atau orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Karena itu, makna gadai (*Rahn*) dalam bahasa hukum Perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan, dan runguhan.<sup>19</sup>

Dari Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan kata pelaksanaan gadai bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem yang berhubungan dengan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Ungkapan mekanisme

<sup>18</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, Yogyakarta: Teras, 2011, h.91-92.

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, , h. 2.

mengandung arti bahwa pelaksanaan gadai bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan yang diterapkan dalam proses pinjaman yang disertai jaminan.

## 2. Dasar Hukum Gadai dan Hukum Gadai

### a. Dasar Hukum Gadai

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syari'ah adalah ayat-ayat Al- Qur'an, hadits Nabi Muhammad saw, ijma' para ulama, dan fatwa MUI. Hal dimaksud diungkapkan sebagai berikut:

#### 1) al-Qur'an

Sebagai landasan hukum pinjam meminjam dengan jaminan (*borg*) adalah firman Allah Swt dalam Surah Al-Baqarah ayat 283 sebagai Berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ  
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ  
رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا  
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨٣)

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu

menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya".<sup>20</sup>

*Ferihanun maqbudhantu* memberikan landasan bagi pelaksanaan pemberian *borg* atas transaksi di perjalanan secara tidak tunai. Penyerahan *borg* semata-mata sebagai wujud prinsip kehati-hatian. Pemberlakuan ini juga tetap disertai dengan sikap moral dapat dipercaya dan pemenuhan prinsip dapat dipertanggungjawabkan.<sup>21</sup>

## 2) Hadist

Hadis riwayat Aisyah ra., ia berkata:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ تَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ  
(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ).

“Dari Aisyah r.a. bahwasanya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi secara tempo dan ia menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi itu.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)<sup>22</sup>

Dari Abu Hurairah ra. Nabi SAW bersabda :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
: لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ

<sup>20</sup> Imam Ghazali masykur, dkk, *Al Mumayyaz (Al-qur'an Tajwid)*, Bandung: Cipta Bagus Segara, 2013. h. 49.

<sup>21</sup> Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 243.

<sup>22</sup> Indri, *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Kencana, 2015, h. 198.

غُرْمُهُ. ( رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّا لَمَحْفُوظٌ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ غَيْرِهِ إِزْسَالُهُ ).

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Rasulullah saw.pernah bersabda: “tidak akan hilang barang gadai dari pemiliknya yang menggadaikan. Ia mendapat keuntungannya.” (HR. Daraquthni Hakim, para rawinya dapat dipercaya, hanya saja yang terpelihara pada Sunan Abu Dawud dan lainnya ialah hadits Mursal)<sup>23</sup>

Nabi bersabda :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرُّهُ نَافِقًا زَلَبُنُ اللَّحْمَ يُشْرَبُ  
بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرُّهُ نَافِقًا عَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النِّفَقَةُ.  
(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Rasulullah saw.pernah bersabda: “punggung hewan yang digadaikan boleh dinaiki dengan membayar, dan susu binatang ternak boleh diminum dengan membayar bilamana binatang digadaikan. dan bagi orang yang menaiki dan meminumnya wajib membayar”. (HR.Bukhari).

Nabi bersabda :

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ  
فُلَانًا قَدِمَ بَرًّا مِنَ الشَّامِ فَلَوْ بَعَثْتَ إِلَيْهِ فَأَخَذَتْ مِنْهُ

<sup>23</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, Semarang: Pustaka Nuun, 2011. h,235.



ثَوْبَيْنِ نِسِيَّةٍ إِلَى مَيْسَرَةٍ؟ فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَأَمْتَنَعَ. أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ  
وَرَجَّالُهُ ثَقَاتٌ.

“Dari Aisyah r.a., ia berkata: “aku berkata kepada Rasulullah SAW., “wahai Rasulullah, sesungguhnya Fulan telah mendapatkan kain dari Syam. Seandainya baginda mengutus seseorang kepada Fulan baginda akan dapat mengambil dua potong kain dengan bayaran ditanggihkan nanti diwaktu lapang. Maka Rasulullah saw. Mengutus seseorang kepada Fulan tersebut, namun pemiliknya menolak.” (HR. Hakim dan Baihaqi, para rawiya dapat dipercaya)<sup>24</sup>

### 3) Ijma' Ulama

Berdasarkan Al-Quran dan Hadist diatas, menunjukkan bahwa transaksi Gadai pada dasarnya dibolehkan dalam Islam, bahkan Nabi Muhammad Saw pernah melakukannya. Demikian juga jumhur ulama telah sepakat akan kebolehan gadai itu. Namun demikian, perlu dilakukan pegkajian lebih dalam dengan melakukan *ijtihad*.<sup>25</sup>

### 4) Fatwa Dewan Syaria'ah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan gadai syariah, di antaranya di kemukakan sebagai berikut :

- a) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn*;
- b) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN– MUI/III/2002, tentang *Rahn* Emas;

<sup>24</sup> *Ibid*, h,235.

<sup>25</sup> Salsi Rais, *Penggadaian syariah: Konsep dan Sistem Operasi (Suatu Kajian Kontemporer)*, Jakarta: UI-Press, 2008, h. 41.

- c) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 09/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan *Ijarah*;
- d) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 10/DSN-MUI/IV/2000, tentang *Wakalah*;
- e) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 43/DSN-MUI/VIII/2004, tentang Ganti Rugi.<sup>26</sup>

Disamping itu para ulama sepakat membolehkan akad *Rahn*, landasan ini kemudian diperkuat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *Rahn* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :

**1) Ketentuan Umum :**

- a) *Murtahin* (penerima gadai) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang gadai) sampai semua hutang *rahin* (pemberi gadai) di lunasi.
- b) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.
- c) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat juga dilakukan oleh *murtahin*,

---

<sup>26</sup>*Ibid*, h.8.

sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.

d) Besar biaya Administrasi dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

e) Penjualan *marhun* :

1. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
2. Apabila *rahin* tetap tidak melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa atau dieksekusi.
3. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutangnya, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
4. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.<sup>27</sup>

## 2) Ketentuan Penutup :

- a) Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaian nya dilakukan melalui Badan Arbitrase Islam.
- b) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 390.

<sup>28</sup> Nurul Huda dan Mohammad Heykal , *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta : Kencana 2010, h. 278-279.

### b. Hukum Gadai (*Rahn*)

Para ulama sepakat bahwa *Rahn* dibolehkan, tetapi tidak diwajibkan sebab gadai hanya jaminan saja jika kedua pihak tidak saling mempercayai.

Firman Allah SWT: pada ayat *irsyad* (anjuran baik) saja kepada orang beriman sebab dalam lanjutan ayat tersebut dinyatakan:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ ... (٢٨٣)

Artinya: ”Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya).<sup>29</sup>

Selain itu perintah untuk memberikan jaminan sebagaimana dinyatakan dalam ayat tersebut dilakukan ketika tidak ada penulis, padahal hukum hutang sendiri tidaklah wajib, begitu juga penggantinya, yaitu barang jaminan. Alasan hukum bolehnya *muamalah* dengan memberikan agunan atau jaminan itu adalah dengan memberikan agunan itu memberikan keringanan kepada pelaku *muamalah* dalam pergaulan hidup dan kepuasan hati baginya dalam bermuamalah.<sup>30</sup>

## 3. Pelaksanaan gadai (*Rahn*)

### a. Ketentuan Umum Pelaksanaan *Rahn* dalam Islam

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan *ar-rahn* antara lain:

<sup>29</sup> Imam Ghazali masykur, dkk, *Al Mumayyaz (Al-qur'an Tajwid)*...h. 49.

<sup>30</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2004, h. 161-162.

### 1) Kedudukan Barang Gadai.

Selama ada di tangan pemegang gadai, maka kedudukan barang gadai hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya oleh pihak penggadai.

### 2) Pemanfaatan Barang Gadai.

Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan, maka barang tersebut boleh dimanfaatkan. Oleh karena itu agar di dalam perjanjian gadai itu tercantum ketentuan jika penggadai atau penerima gadai meminta izin untuk memanfaatkan barang gadai, maka hasilnya menjadi milik bersama. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari harta benda tidak berfungsi atau mubazir.

### 3) Resiko Atas Kerusakan Barang Gadai

Ada beberapa pendapat mengenai kerusakan barang gadai yang disebabkan tanpa kesengajaan *murtahin*. Ulama mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa *murtahin* (penerima gadai) tidak menanggung resiko sebesar harga barang yang minimum. Penghitungan di mulai pada saat diserahkannya barang gadai kepada *murtahin* sampai hari rusak atau hilang.

#### 4) Pemeliharaan Barang Gadai

Para ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penggadai dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari penggadai dan tetap merupakan miliknya. Sedangkan para ulama' Hanafiyah berpendapat lain, biaya yang diperlukan untuk menyimpan dan memelihara keselamatan barang gadai menjadi tanggungan penerima gadai dalam kedudukannya sebagai orang yang menerima amanat.

#### 5) Kategori Barang Gadai

Jenis barang yang biasa digadaikan sebagai jaminan adalah semua barang bergerak dan tak bergerak yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Benda bernilai menurut hukum *syara'*
- b. Benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi
- c. Benda diserahkan seketika kepada murtahin

#### 6) Pembayaran atau Pelunasan Utang Gadai.

Apabila sampai pada waktu yang sudah ditentukan, *rahin* belum juga membayar kembali utangnya, maka *rahin* dapat dipaksa oleh marhun untuk menjual barang gadaianya dan kemudian digunakan untuk melunasi hutangnya.



## 7) Prosedur Pelelangan Gadai

Jumhur fukaha berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh menjual atau menghibahkan barang gadai, sedangkan bagi penerima gadai dibolehkan menjual barang tersebut dengan syarat pada saat jatuh tempo pihak penggadai tidak dapat melunasi kewajibanya.<sup>31</sup>

### b. Rukun dan Syarat Gadai

Pada umumnya aspek hukum keperdataan Islam (*fiqh mu'amalah*) dalam hal transaksi baik dalam bentuk jual beli, sewa-menyewa, gadai maupun yang semacamnya mempersyaratkan rukun dan syarat sah termasuk dalam transaksi gadai. Demikian juga hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi gadai. Hal dimaksud diungkapkan sebagai berikut.

#### 1. Rukun Gadai

Gadai atau pinjaman dengan jaminan suatu benda memiliki beberapa rukun, antara lain:<sup>32</sup>

Para ulama *fiqh* berbeda pendapat dalam menetapkan rukun *ar-Rahn*

##### a) *Aqid* (Orang yang Berakad)

*Aqid* adalah orang yang melakukan akad yang meliputi 2 (dua) arah, yaitu (a) *rahin* (orang yang menggadaikan barangnya), dan (b) *Murtahin* (orang yang berpiutang dan menerima barang gadai ),

<sup>31</sup><http://zezameirisenthia90.blogspot.com/2016/06/makalah-fiqh-muamalah-gadai-rahm.html?m=1> (di akses Tanggal 27 agustus 2018 pukul 09:30).

<sup>32</sup> Hendi Suhendi, *fiqh Muamalah*,...h. 107

atau menerima gadai. Hal dimaksud didasari oleh *shighat*, yaitu ucapan berupa *ijab qabul* (serah terima antara penggadai dengan penerima gadai)<sup>33</sup>. Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang bertransaksi gadai yaitu *rahin* (pemberi gadai) dan *murtahin* (penerima gadai) adalah: <sup>34</sup>.

- 1) Telah dewasa
- 2) Berakal;
- 3) Atas keinginan sendiri.

b) *Ma'qud alaih* (barang yang diakadkan)

*Ma'qud alaih* meliputi 2(dua) hal yaitu, *Marhun* (barang yang digadaikan), dan *Marhun bihi (dain)*, atau utang yang karenanya diadakan akad *Rahn*<sup>35</sup>.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang akan digadaikan oleh *rahin* (pemberi gadai) adalah: <sup>36</sup>

- 1) Dapat diserahkan
- 2) Bermanfaat
- 3) Milik *rahin* (orang yang menggadaikan)
- 4) Jelas
- 5) Tidak bersatu dengan harta lain
- 6) dikuasai oleh *rahin*

---

<sup>33</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 20.

<sup>34</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syari'ah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006, h. 91.

<sup>35</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai*,... h. 20

<sup>36</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syari'ah*,... h. 92

7) Harta yang tetap atau dapat dipindahkan.

## 2. Syarat-Syarat Gadai

Selain rukun yang harus terpenuhi dalam transaksi gadai, maka ada juga syarat-syarat gadai yang terdiri atas:

### a) *shighat*

Syarat *shighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang. Misalnya, orang yang menggadaikan hartanya mempersyaratkan tenggang waktu utang habis dan utang belum terbayar, sehingga pihak penggadai dapat di perpanjang satu bulan tenggang waktunya. Kecuali jika syarat itu mendukung kelancaran akad diperbolehkan. Sebagai contoh, pihak penerima gadai meminta supaya akad itu disaksikan oleh dua orang saksi<sup>37</sup>.

### b) Pihak- Pihak Yang Berakad Cakap Menurut Hukum

Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum mempunyai pengertian bahwa pihak *rahin* dan *marhun* cakap melakukan perbuatan hukum, yang ditandai dengan *aqil baliqh*, berakal sehat, dan mampu, melakukan akad.

Menurut sebagian pengikut ulama Abu Hanifah membolehkan anak-anak yang *mumayyiz*<sup>38</sup> untuk melakukan akad karena dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Syarat orang yang

<sup>37</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai*,... h. 20

<sup>38</sup> *Mumayyiz* adalah seorang anak yang telah memasuki perkembangan otak dan fisik dalam tahap sempurna, namun belum dalam keadaan benar-benar sempurna karena belum Baligh.

menggadaikan (*ar-rahin*) dan orang yang menerima gadai adalah cakap bertindak dalam kacamata hukum. Lain halnya menurut mayoritas ulama, orang yang masuk dalam kategori ini adalah orang yang telah *baligh* dan berakal; sedangkan menurut ulama mazhab Hanafi, kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan *baligh*, melainkan cukup sudah berakal saja dan mendapat persetujuan dari walinya.

c) Utang (*Marhun Bih*)

Utang (*marhun bih*) mempunyai pengertian bahwa :

- 1) Utang adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang;
- 2) Merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah; dan
- 3) Barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.

Ulama Hanafiyah memberikan beberapa syarat, yaitu:<sup>39</sup>

- 1) Marhum bih hendaklah barang yang wajib diserahkan
- 2) Marhun bih memungkinkan dapat dibayar
- 3) Hak atas marhun bih harus jelas

Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah memberikan syarat, yaitu:

- 1) Berupa utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan
- 2) Utang harus lazim pada waktu akad
- 3) Hutang harus jelas

---

<sup>39</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*,...h.163.

*d) Marhun*

*Marhun* adalah barang yang dijadikan jaminan oleh *rahin*. Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual belikan, yang ketentuannya adalah:

- 1) Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut
- 2) ketentuan syariat Islam;
- 3) Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan nilai utang;
- 4) Agunan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik);
- 5) Agunan itu milik sah debitur;
- 6) Agunan itu tidak terikat dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya);
- 7) Agunan itu harus harta yang utuh; dan
- 8) Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya<sup>40</sup>.

**c. Hak dan kewajiban pihak yang berakad**

1. Penerima Gadai (*Murtahin*)

a) Hak Penerima Gadai

---

<sup>40</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendikiawan*, Jakarta: Tazkia Institute, 2001, h. 21.

Apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo, *murtahin* berhak untuk menjual *marhun*. Untuk menjaga keselamatan *marhun*, pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang dikeluarkan. Pemegang gadai berhak menahan barang gadai dari selama pinjaman belum dilunasin.

b) Kewajiban Penerima Gadai *rahin*,

Apabila terjadi sesuatu (hilang ataupun carat) terhadap *marhun* akibat dari kelalaian, maka *murtahin* harus bertanggung jawab. Tidak boleh menggunakan *marhun* untuk kepentingan pribadi Sebelum diadakan pelelengan *marhun*, harus ada pemberitahuan kepada *rahin*.

2. Pemberi Gadai (*Rahin*)

a) Hak Pemberi Gadai

Setelah pelunasan pinjaman, *rahin* berhak atas barang gadai yang diserahkan kepada *murtahin*. Apabila terjadi kerusakan atau hilangnya barang gadai akibat kelalaian *murtahin*, *rahin* menuntut ganti rugi atas *marhun*. Setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya, *rahin* berhak menerima sisa hasil penjualan *marhun*. Apabila diketahui terdapat penyalahgunaan *marhun* oleh *murtahin*, maka *rahin* berhak untuk meminta *marhunnya* kembali.

b) Kewajiban Pemberi Gadai

Melunasi pinjaman yang telah diterima serta biaya-biaya yang ada dalam kurun waktu yang telah ditentukan apabila dalam jangka



waktu yang telah ditentukan *rahin* tidak dapat melunasi pinjamannya, maka harus merelakan penjualan atas *marhun* yang dimilikinya.

#### **d. Pengambilan Manfaat Barang Gadai.**

Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemilik barang maupun oleh pegadai, kecuali apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Sebab hak pemilik barang tidak memiliki secara sempurna yang memungkinkan ia melakukan perbuatan hukum, misalnya mewakafkan, menjual dan sebagainya sewaktu-waktu atas barang miliknya itu; sedangkan hak penggadai terhadap barang gadai hanya pada keadaan atau sifat kebendaanya yang mempunyai nilai, tetapi tidak pada pengguna dan pemanfaatan atau pemungutan hasilnya.<sup>41</sup>

Pendapat beberapa ulama fikih mengenai pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh *rahin* dan *murtahin*.

##### **1. Rahin Memanfaatkan Marhun**

Status *rahin* dalam transaksi akad gadai adalah pemilik barang. Namun, kepemilikan itu dibatasi oleh hak *habsu* (menahan barang gadai) oleh *murtahin*. Oleh karena itu, dalam perjanjian gadai maka *rahin* tidak mempunyai hak penuh untuk memanfaatkan barang miliknya yang telah digadaikan. Mengenai pemanfaatan *rahin* atas *marhun* dimaksud, para ulama berbeda pendapat sebagai berikut.

Mayoritas ulama melarang dan atau tidak membolehkan jenis pemanfaatan dalam transaksi gadai. Lain halnya Syafi'iyah berpendapat

---

<sup>41</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997. h.124.

bahwa *rahin* dibolehkan untuk memanfaatkan barang jika tidak menyebabkan *borg* berkurang, tidak perlu meminta izin, seperti mengendarainya, menempatnya dan lain-lain. Akan tetapi jika menyebabkan barang berkurang, seperti sawah, kebun, *rahn* harus meminta izin pada *murtahin*.<sup>42</sup> Ulama Syafi'iyah membolehkan pemanfaatan barang gadai sepanjang pemanfaatannya itu tidak membahayakan *marhun*.<sup>43</sup> bahwa yang mempunyai hak atas manfaat harta benda gadai (*marhun*) adalah pemberi gadai (*rahin*) walaupun *marhun* itu berada dibawah kekuasaan penerima gadai (*murtahin*).<sup>44</sup> Kebolehan ini berdasarkan dalil hukum bahwa manfaat dan hasil dari barang gadai tersebut adalah milik *rahin* dan tidak bisa dikaitkan dengan hutang yang ditanggungnya. Berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا زَلَبُنُ اللَّحْمَ يُشْرَبُ  
بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ.  
(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Rasulullah saw.pernah bersabda: “punggung hewan yang digadaikan boleh dinaiki dengan membayar, dan susu binatang ternak boleh diminum dengan membayar bilamana binatang digadaikan. Dasn bagi orang yang menaiki dan meminumnya wajib

<sup>42</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syari'ah di Indonesia*,... h. 93.

<sup>43</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*,... h. 31

<sup>44</sup> Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: LSIK, 1997. h. 333.

membayar”. (HR.Bukhari).<sup>45</sup>

Ulama Hanabilah mempunyai pendapat: *rahin* tidak berhak memanfaatkan *marhun* yang masih dalam perjanjian tanpa seizin *murtahin*. Ketika *rahin* dan *murtahin* tidak mencapai kesepakatan dalam penentuan batas-batas kebolehan pemanfaatan, maka barang gadai harus dibiarkan karena merupakan barang yang tertahan dari pemanfaatan sampai *rahin* melunasi hutangnya. Pandangan Ulama Hanabilah dimaksud, berdasarkan pada paradigma bahwa barang gadaian dan seluruh manfaatnya adalah harta yang tertahan (*mahbusah*).

Ulama Malikiyah mempunyai pendapat tentang pelarangan pemanfaatan barang gadai oleh *rahin*, bahkan walaupun pihak *murtahin* mengizinkan pemanfaatan barang gadaian maka status hukumnya tetap dilarang. Apabila *murtahin* memberi izin pada *rahin* untuk pemanfaatan barang gadai maka menurut mereka akad gadai batal karena tidak memenuhi kondisi penahanan terhadap barang gadai. Selain itu, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *rahin* selaku pihak yang menggadaikan barang, ia tidak boleh memanfaatkan barang gadai (*marhun*), mereka melarang pemanfaatan seperti ini karena hak menahan *marhun* berada pada pihak *murtahin* sehingga ia memiliki hak yang tetap sampai akad *rahn* itu berakhir. Jadi, ketika *rahin* memanfaatkan *marhun* tanpa seizin *murtahin* berarti ia telah melakukan perbuatan yang melawan hukum

---

<sup>45</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, Semarang: Pustaka Nuun, 2011. h,235.

(*ghashab*).<sup>46</sup> Begitu pula *murtahin* tidak boleh memanfaatkan tanpa seizin *rahin*. Alasannya hadis Nabi Muhammad SAW. Sebagai berikut.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرُّهُ نَا زَلَبْنُ اللَّزَّ يُشْرَبُ  
بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرُّهُ تَوَاعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ.  
(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Rasulullah saw.pernah bersabda: “punggung hewan yang digadaikan boleh dinaiki dengan membayar, dan susu binatang ternak boleh diminum dengan membayar bilamana binatang digadaikan. Dasn bagi orang yang menaiki dan meminumnya wajib membayar”. (HR.Bukhari).<sup>47</sup>

## 2. Murtahin Memanfaatkan Marhun

Apabila *rahin* sebagai pemilik *marhun*, maka *murtahin* sebagai pihak yang yang berhak menahan *marhun* untuk jaminan hutang *rahin*. Dalam akad perjanjian *rahn* menurut kebanyakan ulama disyaratkan oleh adanya *rahin* yang menyerahkan *marhun* kepada *murtahin*. Penyerahan *marhun* merupakan salah satu syarat dari akad *rahn*, sehingga ketika seorang menggadaikan suatu barang, tetapi ia membatalkannya, sebab gadaian yang belum ada penerimaan merupakan akad yang *jaiz* (boleh diubah), oleh karena itu, ia boleh menarik kembali akad gadaianya, sebagaimana khiyar dalam jual beli. Pada kondisi seperti hal dimaksud, barang gadai berada ditangan *murtahin* hanya berhak menahan, tetapi

<sup>46</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*,... h. 31-32

<sup>47</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Bukhari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2007.

bukan memilikinya. Karena itu, bagaimana status pemanfaatan yang harus dilakukan terhadap barang gadai ? pada permasalahan ini, para ulama berbeda pendapat dalam hal *murtahin* yang memanfaatkan harta gadai. Perbedaan yang dimaksud, dikemukakan sebagai berikut:

Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan, baik mengendarai, mengambil susu binatang ternak dan lain sebagainya, kecuali atas izin *rahin*. Apabila hal itu dilakukan oleh *murtahin*, status hukumnya seperti orang *ghashab*<sup>48</sup>. Namun, bila *rahin* mengizinkan *murtahin* memanfaatkan harta gadai maka ulama Hanafiyah membaginya menjadi 2 (dua) pendapat, yaitu:

1. Membolehkan secara mutlak, dan
2. Mensyaratkan sebagai salah satu syarat yang tercantum dalam akad sehingga *murtahin* dapat memanfaatkan marhun. Namun, hal itu dapat menjerumuskan pada riba.<sup>49</sup>

Jika disyaratkan ketika akad untuk memanfaatkan *marhun* hukumnya haram sebab termasuk riba.<sup>50</sup> sebagaimana hadits Nabi Muhammad saw.

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً رِبَاً (رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَسَا مَةَ).

“Dari Ali ra., berkata: Nabi SAW bersabda: semua pinjaman yang

<sup>48</sup> *Ghashab* adalah mengambil sesuatu secara paksa dan terang-terangan.

<sup>49</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*,... h. 35

<sup>50</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*,... h. 174

menarik manfaat adalah riba.” (HR. Harits bin Usamah)<sup>51</sup>

Ulama malikiyah berpendapat mengenai status hukum pemanfaatan yang dilakukan oleh *murtahin* atas *marhun* menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

(a) dalam hutang yang bersifat pinjaman, (b) dalam hutang piutang yang bersifat jual beli atau transaksi *mu'awwadah* (pertukaran). Dalam bentuk pertama ulama Malikiyah melarang segala bentuk pemanfaatan *murtahin* atas *marhun* walaupun hal itu merupakan *tabarru'* dari *rahin* kepada *murtahin*.

Ulama Syafi'iyah secara umum berpendapat seperti pendapat Ulama Malikiyah, yaitu pemanfaatan yang dilakukan oleh *murtahin* atas *marhun* itu tidak dibolehkan. Karena itu, jika *murtahin* mensyaratkan pemanfaatan *marhun* dalam akad *rahn* yang didasarkan pada akad *qord* maka syarat tersebut menjadi batal, demikian pula akad pegadaannya, karena itu dapat membahayakan kepentingan *rahin*.

Bagi ulama Hambali pemanfaatan atas barang gadai harus dipisahkan antara benda mati dan benda hidup (hewan). Kalau *marhun* berupa barang-barang selain hewan yang tidak diperlukan biaya pemeliharaan seperti rumah, perhiasan, dan lain-lain, maka *murtahin* dilarang memanfaatkan barang-barang tersebut tanpa seizin *rahin*. Namun, bila ada izin dari *rahin*, dalam pengertian gadai itu merupakan

---

<sup>51</sup> Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006. h. 495.



harga barang jualan, atau sewa rumah maka hal itu diperbolehkan oleh ulama Hanabilah. Lain halnya dalam perjanjian gadai hewan ternak atau tunggangan, maka ulama Hambali *murtahin* boleh mengambil manfaatnya yang seimbang atau yang sepadan dengan nafkah yang dikeluarkan untuk merawat atau memelihara *marhun*, walaupun *rahin* tidak mengizinkannya. Pendapat mereka dalam hal dimaksud, berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw:

"Kendaraan dapat digunakan dan hewan ternak dapat diambil manfaatnya apabila digadaikan". (H.R. Ibnu Majah).<sup>52</sup>

Hadis diatas menjelaskan bahwa bagi yang memelihara barang gadai, maka ia boleh mengambil manfaat dari barang gadai tersebut sesuai dengan biaya yang ia keluarkan.<sup>53</sup> Lain halnya pendapat Sayyid Sabiq, akad gadai bertujuan untuk meminta kepercayaan dan menjamin hutang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Tindakan memanfaatkan barang adalah tak ubahnya seperti *qiradh*, dan setiap bentuk *qiradh* yang mengalir manfaat adalah riba.<sup>54</sup>

Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun *rahin* mengizinkannya, karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba<sup>55</sup>. Rasulullah saw. Bersabda:

---

<sup>52</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Bukhari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2007. h. 419.

<sup>53</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*,... h. 35-36.

<sup>54</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syari'ah di Indonesia*,... h. 94.

<sup>55</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,... h. 108.

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً رِبَاً (رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَسَا مَةَ).

“Dari Ali ra., berkata: Nabi SAW bersabda: semua pinjaman yang menarik manfaat adalah riba.” (HR. Harits bin Usamah)<sup>56</sup>

#### e. Riba dan gadai

Perjanjian dalam gadai pada dasarnya adalah perjanjian utang-piutang, hanya saja dalam gadai ada jaminannya, riba akan terjadi dalam gadai apabila dalam akad gadai ditentukan bahwa *rahin* harus memberikan tambahan kepada *murtahin* ketika membayar utangnya. Bila *rahin* tidak mampu membayar utangnya hingga waktu yang telah ditentukan, kemudian *murtahin* menjual *marhun* dengan tidak memberikan kelebihan harga *marhun* kepada *rahin*, maka dalam transaksi gadai yang seperti ini juga terdapat riba.<sup>57</sup>

Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً رِبَاً (رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَسَا مَةَ).

“Dari Ali ra., berkata: Nabi SAW bersabda: semua pinjaman yang menarik manfaat adalah riba.” (HR. Harits bin Usamah).<sup>58</sup>

<sup>56</sup> Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*,... h. 495.

<sup>57</sup> <http://juraganmakalah.blogspot.co.id/2013/06/gadai-Islami.html?m=1> (di akses 21 Januari 2018, pukul 20:00 WIB )

<sup>58</sup> Indri, *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*..., h,211.

Larangan tersebut berlaku jika barang gadai bukan berupa binatang ternak yang bias diambil susunya dan binatang yang biasa ditunggangi apabila mendapat izin dari pemiliknya.<sup>59</sup>

Adapun jaminan yang berlaku seorang menjaminkan sawah atau pohon kelapa, semua penghasilannya diambil oleh orang yang memegang jaminan, hal itu tidak sah dan tidak halal, sebab jaminan itu hanya berguna untuk menambah kepercayaan yang berpiutang kepada yang berhutang, bukan untuk mencari keuntungan bagi yang berpiutang.<sup>60</sup>

#### **4. Pandangan Islam Tentang Pelaksanaan Gadai**

##### **a. Prinsip Dasar Ekonomi Islam**

Ilmu Ekonomi Islam sebagai sebuah teori atau hukum-hukum dasar yang menjelaskan perilaku-perilaku antara variabel ekonomi dengan memasuki unsur norma ataupun tata aturan tertentu. Karenanya, ekonomi Islam tidak hanya menjelaskan fakta-fakta secara apa adanya, tetapi juga harus menerapkan apa yang seharusnya dilakukan, dan apa yang seharusnya dikesampingkan (dihindari).

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karenanya ia merupakan bagian tak terpisahkan (Integral) dari agama Islam. Sebagai derivasi dari agama Islam, Ekonomi Islam akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya. Islam adalah sistem kehidupan (*way of life*), di mana Islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi

---

<sup>59</sup> *Ibid*, h,212.

<sup>60</sup> Sulaiman rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015. h. 312.

kehidupan manusia, termasuk dalam bidang Ekonomi. beberapa aturan ini bersifat pasti dan berlaku permanen, serta beberapa yang bersifat kontekstual sesuai dengan situasi dan kondisi. Penggunaan agama sebagai dasar ilmu pengetahuan telah menimbulkan diskusi panjang dikalangan ilmunan, meskipun sejarah telah membuktikan bahwa hal ini adalah sebab keniscayaan.

Tata aturan syariah dalam ekonomi yang berasal dari Al-qur'an dan hadist itu, memuat beberapa prinsip dasar umum sebagai landasan dan dasar pengembangan Ekonomi Islam. Prinsip ini membentuk keseluruhan kerangka Ekonomi Islam, yang di ibaratkan sebagai sebuah bangunan dapat divisualisasikan pada gambar rancang bangunan Ekonomi Islam.<sup>61</sup>

Bangunan Ekonomi Islam didasari atas lima dasar yakni: *Tauhid* (keimanan), *'Adl* (adil), *Nubuwwah* (kenabian), *Khilafah* (perintahan), *Ma'ad* (hasil), atau *Falsafah* (sukses), kelima dasar ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun proposisi-proposisi dan teori-teori Ekonomi Islam.<sup>62</sup>

#### **b. Pandangan Ekonomi Islam Tentang Gadai (*Rahn*)**

Menurut pandangan Ekonomi Islam *rahn* dapat diartikan menitipkan suatu barang sebagai jaminan utang yang di berikan kepada orang yang memberikan piutang. Namun tidak untuk mencari keuntungan dari barang

<sup>61</sup> Salsi Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*,... h. 20-21.

<sup>62</sup> Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, h. 34. Lihat juga Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007, h. 4-8.

tersebut. Landasan di perbolehkannya rahn terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 283. Yaitu mengenai utang – piutang yang di lakukan oleh seseorang yang sedang dalam perjalanan. Maka di anjurkan memberikan suatu barang sebagai jaminan bahwa orang tersebut benar – benar akan membayar hutangnya.

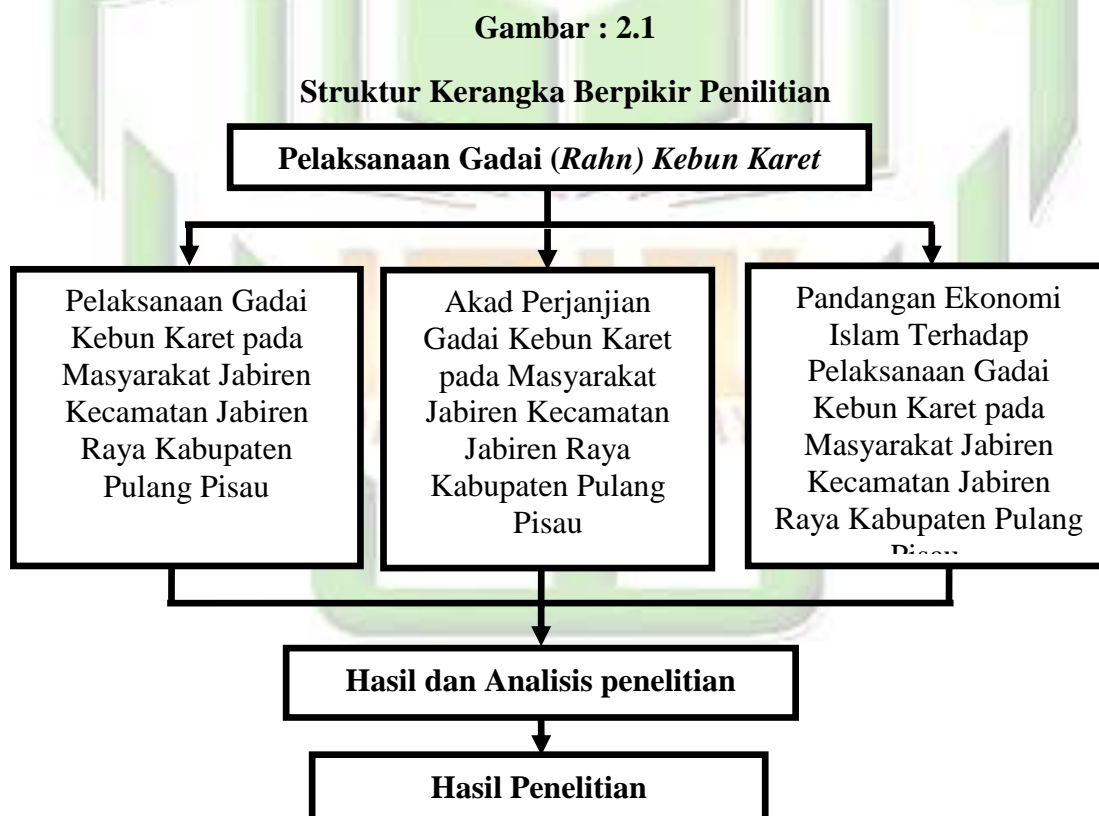
Syarat di lakukannya gadai adalah adanya orang yang menerima dan memberi jaminan, adanya barang jaminan dan utang itu sendiri. Kemudian rukun gadai tu adalah persyaratan *aqid*, *shigat*, syarat *mahrubih*, dan syarat *mahrubun*.

Manfaat barang gadai adalah untuk meyakinkan si pemberi pinjaman bahwa nantinya pinjaman tersebut benar – benar akan di lunasi oleh pemilik barang jaminan. Dan jika nantinya pemilik barang tidak mampu melunasinya maka pemberi piutang boleh meminta ijin untuk menjual barang tersebut dan mengambil uangnya sebatas piutang yang di berikan, dan jika ada biaya yang di keluarkan untuk barang tersebut, juga di ambil dari penjualan barang tersebut. Setelah melihat beberapa hadist dan ayat al-qur'an mengenai gadai kita dapat menyimpulkan bahwa, gadai kebun karet yang biasa di lakukan di Jabiren tidak di perbolehkan dalam islam, karena dalam gadai kebun karet yang biasa di lakukan keuntungannya bisa mencapai dua atau tiga kali lipat dari piutang yang di berikan. Sementara

dalam Islam di jelaskan bahwa utang yang memperoleh keuntungan itu riba hukumnya.<sup>63</sup>

### C. Kerangka Berpikir

kerangka berpikir bermula dari pemahaman tentang teori Gadai tersebut, selanjutnya dikait dengan pelaksanaan sistem gadai kebun karet yang terjadi dimasyarakat, kemudian di analisis dari perlaksanaan gadai kebun karet tersebut menurut pandangan Ekonomi Islam sehingga menemukan hasil penelitian yang nantinya dapat disimpulkan tentang pelaksanaan Gadai Kebun Karet Menurut Pandangan Ekonomi Islam.



Di Buat oleh Penulis 2018

<sup>63</sup> <http://hidayatugp.blogspot.com/2015/08/analisis-pandangan-islam-terhadap.html?m=1>  
(di akses tanggal 25 september 2018 pukul 19:00)



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Tempat Penelitian**

Waktu penelitian dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 bulan setelah surat ijin penelitian dikeluarkan yaitu pada bulan Agustus sampai dengan bulan September 2018. Waktu yang digunakan ini adalah untuk menggali data dan informasi dari para subjek yang berada di lokasi penelitian disajikan kedalam sebuah skripsi, yang kemudian dilanjutkan dengan proses pembimbingan.

Penelitian ini dilakukan di Desa jabiren Kecamatan Jabiren Raya Kota Palangka Raya.

#### **B. Metode dan Alasan Menggunakan Metode**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, gambar, dari orang-orang atau pelaku yang dapat diamati. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.<sup>64</sup>

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif pada hakikatnya ialah mengamati orang dalam hidupnya, berinteraksi dengan mereka berusaha memahami bahasa

---

<sup>64</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002, h. 03.

dan tafsirannya tentang dunia sekitarnya.<sup>65</sup> Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada yaitu keadaan gejala menurut apa adanya saat penelitian dilakukan.<sup>66</sup>

Studi kasus merupakan suatu strategi riset, penelaah empiris yang menyelidiki suatu gejala dalam latar kehidupan nyata. Secara umum, studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan *how* atau *why*, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan bila mana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer ( masa Kini ) didalam konteks kehidupan nyata.<sup>67</sup> Pendekatan kualitatif deksriptif dalam penelitian ini dimaksudkan agar penulis dapat mengetahui dan menggambarkan apa yang terjadi dalam lokasi penelitian secara lugas dan terperinci serta berusaha untuk mengungkapkan data mengenai “Pelaksanaan Gadai Kebun Karet Pada Masyarakat Jabiren Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Menurut Pandangan Ekonomi Islam”.

### C. Objek dan Subjek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Gadai Kebun Karet Pada Masyarakat Jabiren Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Menurut Pandangan Ekonomi Islam. Sedangkan dalam subjek penelitian ini adalah para pegadai dan pihak penerima gadai, penulis menggunakan teknik purposive

<sup>65</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* cet. 6, Bandung: Alfabet, 2010, h.03.

<sup>66</sup>Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003, h. 309.

<sup>67</sup>Robert K. Yin, *Studi Kasus desain & Metode*, Terj. M. Faudzi Mudzakir, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, h.01.

sampling. Menurut nasution bahwa purposive sampling, yaitu mengambil sebagian yang terpilih menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel tersebut.<sup>68</sup> Adapun kriteria yang dijadikan subjek penelitian adalah:

1. Masih Aktif dalam kegiatan pelaksanaan Gadai
2. Beragama Islam
3. Bersedia diwawancara
4. Usia pegadai (*rahin*) dan pemberi gadai (*murtahin*) tersebut diatas 35 tahun

Dari kriteria yang telah ditentukan oleh penulis mengenai Pelaksanaan Gadai Kebun Karet Pada Masyarakat Jabiren Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Menurut Pandangan Ekonomi Islam. Maka didapatkan subjek penelitian 4 (empat) orang penggadai (*rahin*) dan 3 (tiga) orang penerima gadai (*murtahin*). Untuk lebih jelasnya jumlah subjek penelitian dapat dilihat table berikut:

**Tabel 3.1**  
**Subjek penelitian**

No	Nama Inisial	Keterangan	Usia
1	AGN	Pegadai ( <i>rahin</i> )	38 Tahun
2	BRN	Pegadai ( <i>rahin</i> )	65 Tahun
3	KN	Pegadai ( <i>rahin</i> )	35 Tahun
4	AJ	Pegadai ( <i>rahin</i> )	50 Tahun
5	BMN	Penerima Gadai ( <i>murtahin</i> )	55 Tahun
6	IP	Penerima Gadai ( <i>murtahin</i> )	49 Tahun
7	IL	Penerima Gadai ( <i>murtahin</i> )	46 Tahun

Dibuat oleh penulis 2018

---

<sup>68</sup> Nasution, *Metodologi Research (penelitian ilmiah)*, Bandung: Bumi Aksara, 20014, h. 98.

## D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penulisan ini yang digunakan adalah metode sebagai berikut:

### 1. Observasi

Dalam hal ini peneliti dalam melakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun kelapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan. Disini, peneliti melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada subjek penelitian yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti.<sup>69</sup> Menurut Subagyo, observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikologis untuk kemudian dilakukan pencatatan.<sup>70</sup> penulis langsung melakukan pengamatan dilapangan untuk mendapatkan informasi dan kejelasan yang nyata dari para pegadai dan pihak yang menerima pegadaian.

Peneliti menggunakan Observasi berperan serta (*Participant Observation*)<sup>71</sup> karena peneliti ingin terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati, yang mana digunakan sebagai sumber data penelitian. Melalui teknik ini maka diperoleh gambaran data yang lebih akurat

---

<sup>69</sup>M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. I, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012, h 173.

<sup>70</sup>Joko Sobagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004, h. 63.

<sup>71</sup> Sogiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2008. h 145-146.

tentang Pelaksanaan Gadai Kebun Karet Pada Masyarakat Jabiren Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Menurut Pandangan Ekonomi Islam yang meliputi :

- 1) Pelaksanaan Gadai Kebun Karet Pada Masyarakat Jabiren Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Menurut Pandangan Ekonomi Islam.
- 2) Kondisi masyarakat yang melakukan gadai kebun karet dan kondisi kebun karet yang digadai.
- 3) Melihat kondisi kebun karet yang di gadaikan oleh masyarakat Jabiren.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada para responden dan berhadapan langsung antara interview dengan responden serta kegiatannya dilakukan secara lisan. Sedangkan pertanyaan yang tidak terstruktur, penelitian tidak menetapkan masalah pertanyaan yang akan diajukan. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi yang baku atau informasi tunggal.<sup>72</sup> Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data yang berupa penemuan dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar informasi dan ide dengan tanya jawab dengan lisan hingga dapat dibangun makna dalam suatu topik tertentu.<sup>73</sup> Bertanya langsung kepada narasumber proses keterangan tersebut langsung dengan para pegadai

---

<sup>72</sup>M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, h. 83-87.

<sup>73</sup>Andi Praswoto, *Mengusai Teknik-teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Diva Press, 2010, h. 27.

dan pihak yang menerima pegadaian.

Data yang akan digali melalui wawancara tidak tersruktur<sup>74</sup> karena wawancara ini lebih bebas, dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Melalui teknik ini yang digali hanya berupa garis-garis besar permasalahan seperti :

- a) Perihal semua yang meyangkut tentang Pelaksanaan gadai kebun karet yang dilakukan.
- b) Proses akad yang dilakukan saat pelaksanaan gadai kebun karet.

### 3. Dokumentasi

Dokumen disini, meliputi materi (bahan) seperti, fotografi, video, film, memo, surat, diary, rekaman kasus klinis, dan sebagainya yang dapat digunakan sebagai bahan informasi penunjang, dan sebagai bagian berasal dari kajian kasus yang merupakan sumber data pokok berasal dari hasil observasi partisipan dan wawancara mendalam. Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu.<sup>75</sup> Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

Contoh dokumen yang berbentuk tulisan yaitu catatan harian, sejarah kehidupan (*life story*), cerita, biografi, peraturan serta kebijakan. contoh dokumen yang berbentuk gambar yaitu foto, gambar hidup, sketsa dan lain-

<sup>74</sup> Sogiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D...*, h, 138-140.

<sup>75</sup> M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. I..., h. 199.



lain. Teknik dokumentasi yang peneliti dalam penelitian ini, yaitu menggunakan dokumen berbentuk catatan, gambar dan rekaman saat melakukan wawancara dengan responden. Adapun yang diambil dari teknik ini yaitu:

- 1) Surat kepemilikan lahan kebun karet.
- 2) Gambaran umum lokasi penelitian yang ada di Desa Jabiran.
- 3) Foto kebun-kebun karet yang digadaikan.
- 4) Foto hasil kegiatan penelitian.

#### **E. Pengabsahan Data**

Maksud dari pengabsahan data ini adalah untuk menjamin bahwa semua data yang telah diteliti baik melalui hasil wawancara, observasi ataupun dokumentasi adalah sesuai dan relavan dengan kenyataan yang sesungguhnya. Selain itu hal-hal yang disampaikan tentang permasalahan dalam penelitian adalah benar-benar terjadi dan ada di lokasi penelitian.

Terkait secara langsung dengan pengabsahan data ini, penulis menggunakan teknik Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu. Denzin membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.<sup>76</sup>

Adapun triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber.

---

<sup>76</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan Kedua Puluh Tiga, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007, h. 330.

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan: (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi; (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan; (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

## **G. Analisis Data**

Analisis data bermaksud untuk mengorganisasikan data yang terkumpul. Adapun guna analisis data adalah untuk mengatur, mengurutkan dan mengelompokkan, memberikan kode serta mengkategorikannya.<sup>77</sup>

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis data yang dikembangkan oleh Milles dan Huberman yakni sebagai berikut:

1. *Data Reduction* atau pengurangan data, ialah suatu bentuk analisis data yang menajamkan, menggolongkan, memilih mana data yang relevan kemudian dilanjutkan dengan mengorganisasikan data.

---

<sup>77</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan Kedua Puluh, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004, h. 179.

2. Data *Display* atau penampilan data, ialah data yang sudah relevan tersebut disaring dan dituangkan dalam bab IV berupa laporan yang tersusun secara sistematis.
3. Data *Conclusions* atau menarik kesimpulan dari data yang diperoleh, yaitu setelah semua data-data yang diinginkan diperoleh selanjutnya mencari kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah.<sup>78</sup>



---

<sup>78</sup>Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta: Univertas Indonesia Press, 1999, h. 16-19.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Jabiren kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang**

##### **Pisau**

##### **1. Geografi Desa**

Desa Jabiren adalah desa yang berada di wilayah Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Desa ini merupakan salah satu pusat pokok dari Kecamatan Jabiren Raya.

Akses jalan menuju desa Jabiren meliputi jalur darat dan air. Alat transportasi darat yang digunakan ialah sepeda motor roda dua, mobil dan truk. Sedangkan transportasi air ialah *klotok* dan *jukung* (perahu kecil). Kondisi jalan darat cukup baik. Untuk jalur utamanya merupakan jalan lintas Kalimantan. Sehingga memiliki kualitas yang sangat baik. Namun di dalam pedesaan masih terdapat beberapa jalan yang masih belum diperbaiki.

Fasilitas telekomunikasi di desa ini cukup baik. Jaringan telepon seluler berjalan lancar tanpa kendala. Sedangkan jaringan listrik sudah sangat baik. PLN sudah masuk ke seluruh wilayah desa. Listrik di desa ini hidup 24 jam.

Desa Jabiren mempunyai luas wilayah 24.400 ha. Terdiri dari delapan rukun tetangga (RT). Wilayahnya sebagian besar ialah darat, berupa kebun dan hutan. Sebagian lainnya ialah air, yakni sungai besar Kahayan dan juga sungai-sungai kecil menuju daerah Trans RT 8. Desa ini memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan desa pilang

- b. Sebelah selatan berbatasan dengan saka kajang dan Desa henda
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sebangau
- d. Sebelah timur berbatasan dengan sungai kahayan

## 2. Demografi Desa

### a. Jumlah Penduduk

Penduduk desa Jabiren terbagi menjadi tiga area dimana Jabiren atas terbagi menjadi 2 RT. Yakni RT 06 dan RT 07, Jabiren Bawah terdiri dari 5 RT yakni RT 1 s/d RT 5, dan Dusun Jabiren (Trans jabiren) terdiri dari 1 RT yaitu RT 8. Jumlah penduduk RT 06 dan RT 07 adalah 1108 jiwa dengan 291 KK. Jumlah penduduk jabiren bawah adalah 1614 jiwa dengan 452 KK. Serta warga Dusun jabiren dengan 246 jiwa dan 77 KK.

Penduduk yang berdomosili di Jabiren 820 Kepala Keluarga 2.965 jiwa yang terdiri dari laki-laki 1562 jiwa dan perempuan 1403 jiwa, berdasarkan usia, penduduk Jabiren terbanyak terdapat pada usia 20-60 tahun. Dengan jumlah 888 jiwa dan yang paling sedikit pada usia 16-20 tahun dengan jumlah 245 jiwa, untuk lebih jelasnya perhatikan tabel dibawah ini :

**Tabel 4.1**

### **Jumlah Penduduk Menurut Klasifikasi Jenis Kelamin**

NO	JUMLAH KK	LAKI – LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	820	1562	1403	2.965

Sumber data : Kantor Desa Jabiren

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Penduduk Menurut Klasifikasi Kelompok Umur**

NO	USIA					JUMLAH
	0– 12 TH	13– 16 TH	17– 20 TH	21– 60 TH	61 < TH	
1	890	446	445	888	297	2.965

Sumber data : Kantor Desa Jabiren

**b. Pendidikan**

Di desa ini terdapat tiga TK/TPA Untuk tenaga pengajar yang ada di TPA/TKA. Adapun jumlah santri dari TKA/TPA kurang lebih 250 orang termasuk anak – anak dan remaja. Dan jumlah ibu – ibu yang rutin mengikuti pengajian kurang lebih 50 orang dari beberapa majelis.

Desa Jabiren dalam sektor pendidikan terdiri dari SDN 1 jabiren, SDN 2 Jabiren, SMPN1 Jabiren Raya, SMA 1 Jabiren Raya, RA Ayyuhal Walad, TK Satu Atap, TK Melati Mekar.

Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan tersebut, maka dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

**Table 4.3**  
**Jumlah Penduduk Menurut Klasifikasi Pendidikan**

NO	SD	SLTP	SLTA	DIPL. / SARMUD.	S1	S2	S3	JUMLAH
1	138	223	220	15	67	2	0	665

Sumber data : Kantor Desa Jabiren

Dari data diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan, penduduk Jabiren terbanyak adalah dengan



tingkat pendidikan SLTP yaitu 223 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terkecil adalah untuk tingkat pendidikan S2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Jabiren masih rendah dalam sumber daya manusia yang ada.

c. Agama dan Kepercayaan

Dalam perspektif agama desa Jabiren memiliki tiga kepercayaan. Yaitu Islam, Kristen, Dan Hindu Kaharingan. Pada desa ini memiliki mayoritas muslim terbanyak dan Hindu Kaharingan sebagai agama minoritas. Toleransi agama dan kepercayaan di desa Jabiren sangat tinggi. Lembaga pengajian di Desa Jabiren sangatlah beragam serta para alim ulama sudah banyak yang menetap di desa Jabiren. Untuk mengetahui lebih jelas agama yang dianut masyarakat Kenagarian Panti dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.4**  
**Jumlah Penduduk Menurut Klasifikasi Agama**

No	Agama	Jumlah
1	ISLAM	1905
2	KRISTEN	1.056
3	HINDU KAHARINGAN	5
4	BUDHA	-
5	KATHOLIK	-
6	KONGHOCHU	-
Jumlah		2.965

Sumber data : Kantor Desa Jabiren

Dari data diatas dapat diketahui bahwa 1.905 jiwa atau 64.24 % memeluk Islam. Kristen 1.056 Jiwa atau 35,61 % dan Hindu Kaharingan 5 Jiwa atau 0,15%. Dapat dilihat jumlah pemeluk Islam paling banyak yaitu 1.905 Jiwa sedangkan yang paling sedikit yaitu penganut Hindu Kaharingan yang berjumlah 5 Jiwa.

d. Mata pencaharian

Secara garis besar warga masyarakat di desa Jabiren bermata pencaharian yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.5**  
**Jumlah Penduduk Menurut Klasifikasi Jenis Pekerjaan**

No	Mata pencaharian	Jumlah
1	PNS	37
2	TNI	0
3	POLRI	2
4	Buruh	80
5	Pedagang	205
6	Wiraswasta	215
7	Petani/ Nelayan	520
8	Karyawan PT	45
9	Pensiun/ Purnawirawan	5
10	Pekerjaan lainnya	423
11	Belum bekerja	1.433
Jumlah		2.965

Sumber data : Kantor Desa Jabiren

Dari data di atas dapat kita lihat bahwa masyarakat Jabiren mempunyai pekerjaan yang berbeda-beda. Ada yang bekerja sebagai, petani, pedagang, karyawan, wiraswasta, dan tukang. Tetapi antara satu dengan yang lainnya saling membutuhkan, dan salah satunya pekerjaan yang banyak membantu perekonomian masyarakat di Jabiren adalah petani dan nelayan.

e. Sektor kesehatan

Desa Jabiren dalam sektor kesehatan cukup baik. Di desa tersebut terdapat Puskesmas dan Posyandu. Hari kerja Puskesmas ialah dari hari senin s/d jum'at sangat banyak program kerja dari puskesmas tersebut diantaranya kegiatan senam rutin bagi lansia. Serta pemeriksaan dan pengobatan gratis.<sup>79</sup>

## **B. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Pelaksanaan Gadai Kebun Karet pada Masyarakat Jabiren Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau**

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini tentang Pelaksanaan Gadai Kebun Karet Pada Masyarakat Jabiren Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Menurut Pandangan Ekonomi Islam, dalam melakukan wawancara peneliti menanyakan berdasarkan format pedoman wawancara yang tersedia (terlampir), selanjutnya oleh pihak yang diwawancara bahasa yang mereka gunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian antara lain dengan bahasa Indonesia dan juga dicampur dengan bahasa lokal. Untuk

---

<sup>79</sup> Sumber Data dari Kantor Desa Jabiren, Senin 24 september 2018 pukul 08.00

penyajian hasil penelitian, peneliti menyajikan data hasil wawancara dengan bahasa Dayak dan Indonesia, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah penjelasan yang disampaikan oleh para pegadai dan penerima gadai.

Hasil wawancara peneliti dengan beberapa pelaku gadai kebun karet baik pemberi maupun penerima gadai diperoleh banyak informasi tentang gadai kebun karet. Seperti prosedur pelaksanaan gadai kebun karet, isi perjanjian atau kesepakatan kedua belah pihak, pelaksanaan pengolahan barang gadai tersebut, pemanfaatan hasil kebun karet yang di gadai tersebut.

Wawancara dengan ibu MG seorang *informan* ia mengatakan:

*Oluh lewu Jabiren lebih are je bagawi jadi pamalan dengan mambelum manuk dengan lauk karamba. Akan gawi keperluan jandau-jandau, kilau pamalan tana, kolam lauk dengan bakabun gita. Bakabun gita je puna gawi je are oluh Jabiren akan mayukup keperluan keluarga ah, sama ie bagawi dengan kabun ayu maupun bagawi dengan kabun uloh beken. Je mana hasil ah te akan mancukupi keperluan keluarga dan kebutuhan jibeken kea. Je jadi masalah amun tege katika keperluan je mandasak kilau tege pahari je haban, pesta kawin, dan biaya sakola, samantara duit je tege dy cukup akan mambayar keperluan te, akan memenuhi keperluan te jatun luka kare lembaga je tau maminjamkan duit, maka kabun gita ih je nyanda akan uloh mangat akan jaminan ah.*

Terjemah :

Masyarakat Jabiren lebih dominan bekerja sebagai petani dan perternak ayam dan ikan, adapun pekerjaan dalam memenuhi kebutuhan perekonomian sehari-hari, seperti bertani sawah, berkolam ikan, dan berkebun karet. Berkebun karet merupakan pekerjaan yang paling banyak dikalangan masyarakat Jabiren untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, baik dengan bekerja dikebun sendiri maupun bekerja di kebun karet orang lain. Dari penghasilan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan kebutuhan lainnya. yang menjadi masalah ketika ada kebutuhan yang sangat penting seperti ada anggota keluarga yang sakit, pesta pernikahan, dan biaya pendidikan sementara uang yang dimiliki tidak mencukupi, untuk memenuhi kebutuhan diatas disamping tidak adanya dapat pinjaman dari berbagai

instansi dan pihak tertentu, maka kebun karet yang dijadikan sebagai barang gadaian atau jaminan hutang.<sup>80</sup>

- a. Perjanjian yang dilakukan para pegadai di jabiren tidak melalui perum pegadaian tetapi melalui sesama warga

Berdasarkan wawancara dengan bapak AGN seorang pegadai (*rahin*) ia mengatakan:

*Pas jite aku perlu dana capat dengan lumayan are, mau dy mau aku manyanda kabun gita kuh akan keperluan jite. Aku gin manyanda kabun gita gin sama arep kea gawi jatun lembaga gadai to jabiren toh. Hayak aku marasa gin lebih gampang dengan sesama arep gawi asal tege kabun gita ayun arep hayak jatun syarat-syarat je samakilau melai pegadaian pas akad ah te.*

Terjemahan:

pada saat membutuhkan dana cepat dengan jumlah yang cukup besar, mau tidak mau saya menyanda (menggadaikan) kebun karet untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dan saya menyanda (menggadaikan) kebun karet kesesama warga kerana tidak adanya perum pegadaian di desa jabiren. Saya juga merasa lebih mudah menggadaikan kebun karet sesama warga kerana yang dibutuhkan hanya punya kebun karet tanpa syarat-syarat apapun seperti yang ada di pegadai saat akadnya.<sup>81</sup>

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan bapak BRN seorang pegadai (*rahin*) ia mengatakan :

*Pas jite aku perlu dana je cukup are, balu palus aku minjam duit dengan indu IL je kare 5 juta dengan kabun gita je akan jaminan ah. Duit jite akan keperluan anak kuh je lagi haban pas jite.*

Terjemahan:

Saat itu saya membutuhkan uang dalam jumlah besar, sehingga saya meminjam uang dengan ibu IL sebesar 5 juta dengan kebun karet

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Bapak YH (*informan*) , di Jabiren, Selasa 25 september 2018 pukul 11.00

<sup>81</sup> Wawancara dengan Bapak AGN (*rahin*) , di Jabiren, Senin 24 september 2018 pukul 10.00.

sebagai jaminannya. Uang tersebut untuk keperluan berobat anak saya yang sedang sakit kala itu.<sup>82</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan dengan narasumber dapat dipahami dan dikaitkan dengan teori tentang gadai (*rahn*) bahwa *rahn* adalah menitipkan suatu barang sebagai jaminan utang yang di berikan kepada orang yang memberikan piutang. Pegadaian yang dilakukan oleh para pegadai di Jabiren tidak melalui perum pegadaian akan tetapi melalui sesama warga penerima gadai yang ada di Jabiren karena tidak memerlukan syarat-syarat yang penting barang gadai yang berupa kebun karet itu dapat menghasilkan. Besar pinjaman yang diberikan pihak penerima gadai berpariasai artinya sesuai dengan keperluan dan kesepakatan kedua belah pihak.

b. Jangka waktu dalam pelaksanaan gadai yang ada di Jabiren .

Berdasarkan wawancara dengan bapak KN seorang pegadai (*rahin*) ia mengatakan:

*Ayung kuh tege beberapa kabun gita je puna akan pembelun keluarga kuh, amun pas lagi kapepet nah je kilau perlu dana je lumaya hai hayak perlu capat mau dy mau manyanda kabun gita akan perluan jite. Amun bahun katahi manyanda kabun gita paling kare 6 bulan dampai 2 nyelu, tapi pas jite Cuma 1 nyelu ih. Gawi manurut kuh amun sasar tahi waktu maka tambat rugi ih aku gawi lepah hasil kabun gita kuh duan ewen.*

Terjemah:

Saya memiliki beberapa kebun karet yang merupakan mata pencaharian keluarga saya, adapun dalam keadaan mendesak seperti membutuhkan

---

<sup>82</sup>Wawancara dengan Bapak BRN (*rahin*) , di Jabiren, Senin 24 september 2018 pukul 10.30.



dana dalam jumlah besar dan waktu singkat mau tidak mau menggadaikan kebun karet untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Biasanya untuk jangka waktu kebun karet yang digadaikan relative 6 bulan – 2 tahun tapi saat itu saya cuma 1 tahun karena menurut saya kalau semakin lama maka akan makin rugi karena hasilnya terus diambil di penerima gadai (*murtahin*).<sup>83</sup>

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan bapak BMN seorang penerima gadai (*murtahin*) ia mengatakan :

*Pas jite aku manarima kabun gita katahin sanda 1,5 nyelu tapi uloh je manyanda dy sanggup malunas pinjaman ah, jadi duang kuh tarus ih hasil kabun gita gawi dy ulih mambayar pinjaman ah te.*

Terjemah:

Pada saat itu saya menerima gadai dalam jangka waktu 1,5 tahun tetapi si penggadai tidak mampu melunasi pinjaman, sehingga saya terus mengambil hasil kebun karet tersebut selama si penggadai tidak mampu membayar pinjamannya tersebut.<sup>84</sup>

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan bapak IP seorang penerima gadai (*murtahin*) ia mengatakan :

*Pas jite aku manarima sanda kabun gita dan pas waktu je jadi ih nentu uloh je manyanda dy ulih mambayar jaminan ah, gawi jete nah aku manyanda kabun gita jite akan uloh beken, tapi sebelum jite aku jadi balaku ijin dengan uloh je tempu kabun gita kalau aku manyanda kebun gita ayu te, gawi pas jite aku perlu duit capat kea.*

Terjemah:

Saat itu saya juga menerima gadai kebun karet dan pada saat waktu yang ditentukan si pegadai tidak mampu membayar jaminannya sehingga saya menggadai kabun karet tersebut dengan orang lain, akan tetapi sebelumnya saya sudah meminta izin si pemilik kebun karet tersebut untuk menggadaikan kebun karet tersebut karena saya juga membutuhkan uang dalam waktu cepat.<sup>85</sup>

<sup>83</sup> Wawancara dengan Bapak KN (*rahin*) , di Jabiren, Senin 24 september 2018 pukul 13.00.

<sup>84</sup> Wawancara dengan Bapak BMN (*murtahin*) , di Jabiren, minggu 23 september 2018 pukul 11.00

<sup>85</sup> Wawancara dengan Bapak IP (*murtahin*) , di Jabiren, Selasa 25 september 2018 pukul 09.00

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan dengan narasumber dan dikaitkan dengan teori yang ada bahwa untuk jangka waktu dalam gadai kebun karet sudah di sepakati kedua belah pihak, jika jangka waktunya habis dan *rahin* tidak mampu melunasi hutang nya maka lebih baik kebun karet dijual agar dapat mengembalikan hutang yang telah di pinjam agar si *rahin* tidak merasa dirugikan dari pegadaian kebun karet tersebut akan tetapi dapat dipahami bahwa Pegadaian yang dilakukan oleh para pegadai dan penerima gadai di Jabiren jaminan yang gadai akan di pegang oleh penerima gadai selama hutang gadai belum lunas dan bahkan kebun karet tersebut bisa digadai dengan orang lain atau pun dijual kalau orang menerima gadai membutuhkan uang dan si penggadai tidak mampu melunasi hutang tersebut.

c. Alasan menggadaikan dan menerima gadai kebun karet kesesama warga.

Berdasarkan wawancara dengan bapak AJ seorang pegadai (*rahin*) ia mengatakan:

*Aku manyanda kabun gita gawi pas jite aku perlu duit dengan jumlah je are akan biaya anak kuh je lagi haban. Aku manyanda dengan sesama arep gawi aku percaya uloh jite ulih manduhup aku pas jite.*

Terjemah:

Saya menggadaikan kebun karet karena pada saat itu saya membutuhkan uang dalam jumlah besar untuk biaya anak saya yang sedang sakit. Saya menggadaikan sesama warga karena saya percaya orang tersebut dapat membantu pada saat itu.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan Bapak AJ (*rahin*) , di Jabiren, Selasa 25 september 2018 pukul 13.00.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan bapak IL seorang penerima gadai (*murtahin*) ia mengatakan :

*Niat pas manarima sanda pas jite puna akan duhup manduhup akan sama arep je perlu duit jadi palus ih aku manarima sanda te.*

Terjemah:

Niat saya menerima gadai pada saat itu yaitu saling tolong menolong antar sesama yang membutuhkan uang sehingga saya menerima gadai tersebut.<sup>87</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan dengan narasumber dan di kaitkan dengan teori yang ada bahwa *rahn* adalah menjadikan barang berharga sebagai jaminan utang. Yang mana sebenarnya pemberian utang itu merupakan suatu tindakan kebajikan untuk menolong orang yang sedang dalam keadaan terpaksa dan tidak mempunyai uang dalam keadaan kontan, dan untuk itu pemilik uang berhak meminta jaminan dalam bentuk barang berharga seperti kebun karet. Namun tidak untuk mencari keuntungan dari barang gadai tersebut. Maka dapat dipahami bahwa Pegadaian yang dilakukan oleh para pegadai dan penerima gadai di Jabiren alasan mereka menggadai dan menerima gadai yaitu si penggadai ketika itu membutuhkan dana yang besar dalam waktu yang singkat untuk keperluan mendesak sehingga menggadaikan kebun karetnya, sedangkan orang menerima gadai tujuan yaitu saling tolong menolong antar sesama yang membutuhkan.

- d. Fungsi atau kegunaan dari barang gadai yang berupa kebun karet.

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan Ibu IL (*murtahin*) , di Jabiren, Selasa 25 september 2018 pukul 14.00

berdasarkan wawancara dengan bapak BMN seorang penerima gadai (*murtahin*) ia mengatakan :

*Aku dy satuju amun barang sanda te jadi akan ingkes ih dy ji duan kaguna ah gawi adat kebiasaaan amun barang sanda ate ulih duan kaguna ah selama dy marusak ah. Selain jite aku gin bagawi mahasil ah dy kare benyem tunis manduan hasil kabun gita te.*

Terjemah:

Saya tidak setuju kalau barang gadai hanya dijadikan titipan saja tanpa dimanfaatkan karena pada adat kebiasa kalau barang gadai dapat dimanfaatkan selama tidak merusaknya. Selain itu saya juga berkerja dalam menfaatkanya tidak hanya berdiam diri untuk menghasilkan hasil kebun karet tersebut.<sup>88</sup>

Selanjutnya Berdasarkan wawancara dengan bapak KN seorang pegadai (*rahin*) ia mengatakan:

*Manurut kuh wajar ih ewen manguna kabun gita je jadi nyada gawi ewen jadi palua duit akan manarima sanda te amun duit jite dy ie mangguna akan manarima sanda mungkin ulih ie hapan kare usaha je beken hayak kebiasaan kea amun uloh je manarima sanda berhak manduan hasil bara kabun gita te.*

Terjemah:

Menurut saya wajar saja mereka memanfaatkan kebun karet yang sudah di digadaikan karena mereka sudah mengeluarkan uang untuk menerima gadai tersebut seandainya uang tersebut tidak diguna untuk menerima gadai mungkin saja digunakan untuk usaha lain, dan kebiasaan juga kalau orang menerima gadai berhak memanfaatkan hasil dari kebun karet tersebut.<sup>89</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan dengan narasumber dan di kaitkan dengan teori yang ada bahwa *Rahn* adalah semacam jaminan utang, pemegang barang gadai tidak

---

<sup>88</sup> Wawancara dengan Bapak BMN (*murtahin*) , di Jabiren, minggu 23 september 2018 pukul 11.00

<sup>89</sup> Wawancara dengan Bapak KN (*rahin*), di Jabiren, minggu 23 september 2018 pukul 10.00

dibenarkan menggunakan barang gadai kecuali dengan izin orang yang menyerahkan barang gadai (pemilik barang), dimaksud untuk menjaga jangan sampai pihak orang yang menyerahkan barang gadai dirugikan, sebab sebagai pemilik, orang yang menyerahkan barang gadailah yang berhak menikmati hasil-hasil tambahan yang terjadi pada barang gadai selama ada di tangan pemegang barang gadai. Untuk menjaga supaya tidak ada pihak yang dirugikan. Maka dapat dipahami bahwa Pegadaian yang dilakukan oleh para pegadai dan penerima gadai di Jabiren Fungsi atau kegunaan dari barang jaminan antara pihak peminjam dengan pihak yang meminjam uang adalah untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang atau jaminan keamanan uang yang di pinjamkan akan tetapi menjadi kebiasaan kalau penerima gadai berhak memanfaatkan hasil dari kebun karet tersebut .

e. Harapan dari barang jaminan

Berdasarkan wawancara dengan bapak IP seorang penerima gadai (*murtahin*) ia mengatakan :

*Je harap kuh bara kabun karet je nyenda te selain akan duhup manduhup pas jite kea akan manggau kauntung ah kea gawi aku ulih mangguna hasil bara kabun gita jite.*

Terjemah:

Yang saya harapkan dari kebun karet yang di gadaikan selain untuk tolong menolong pada saat itu juga sebagai mencari keuntungan karena saya bisa memanfaatkan hasil dari kebun karet yang digadai tersebut.<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup> Wawancara dengan Bapak IP (*murtahin*) , di Jabiren, Selasa 25 september 2018 pukul 09.00



Selanjutnya Berdasarkan wawancara dengan bapak AJ seorang pegadai (*rahin*) ia mengatakan:

*Ewen dy kare manjadi barang sanda akan ikes bewey atau akan jaminan bewey puna akan ewen manduan hasil ah urah ih bara barang sanda te. Tapi harapan ku katahin kabun gita je nyanda ku dy rusak dan kea dy ie mamantat pas ujan gawi tau marusak batang gita dan jaka tau kea kabun gita te rawat dengan bahalap.*

Terjemah:

Mereka tidak menjadikan barang gadai sebagai titipan atau jaminan saja melainkan mereka mengambil hasil sepenuhnya dari barang gadai tersebut. Akan tetapi harapan saya selama kebun karet yang saya gadaikan tidak rusak dan tidak diambil hasilnya pada saat hujan karena dapat merusak pohon karet dan kalau bisa malahan kebun karet dirawat dengan baik.<sup>91</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan dengan narasumber dan di kaitkan dengan teori bahwa dalam gadai (*rahn*) sudah ada ketentuan hak dan kewajiban pegadai dan penerima gadai. Akan tetapi dapat dipahami bahwa Pegadaian yang dilakukan oleh para pegadai dan penerima gadai di Jabiren tidak sesuai karena barang gadai tidak dijadikan sebagai titipan saja tetapi dimanfaatkan hasil dari kebun karet sepenuhnya, tetapi dalam pengambilan manfaatnya tidak di ambil hasil kebun karet pada saat hujan, karena dapat merusak pohon karetnya.

- f. Pengambilan manfaaat apakah memerlukan biaya pemeliharaan terhadap kebun karet yang di gadai.

Berdasarkan wawancara dengan bapak IL seorang penerima gadai (*murtahin*) ia mengatakan :

---

<sup>91</sup> Wawancara dengan Bapak AJ (*rahin*) , di Jabiren, Selasa 25 september 2018 pukul 13.00.



*Manurut kuh dy perlu kare biaya akan marawat ah gawi hasil kabun gita jadi kana duan kea kala pelepah ah. Amun akan kare pemelihara dan marawat ah otomatis ih mangawi ah gawi pas manduan hasil kabun gita te ikey sambil marawat ah kea kare mandirik uru je darah opon gita ted an kea hasil je dinun tiap andau luman kea sakitar 10-15 kg/andau dan rega gin Rp.6.500 jadi menurut kuh dy perlu kare biaya akan marawat je talu gawi kuh te.*

Terjemah:

Menurut saya tidak perlu biaya pemeliharaan karena hasil kebun karet sudah diambil sepenuhnya. Sedangkan untuk pemeliharaan atau pun perawatan otomatis melakukannya karena saat mengambil hasil kebun karet juga melakukan perawatan seperti memotong rumput di sekitar pohon karet dan juga hasil yang di dapatkan tiap hari cukup lumayan yaitu 10-15 Kg/hari dan harga karet sekarang Rp. 6.500/Kg jadi menurut saya tidak perlu biaya pemeliharaan yang saya lakukan.<sup>92</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan dengan informan dan dikaitkan dengan teori yang ada bahwa biaya perawatan ditanggung oleh *rahin*. Sedangkan yang dapat dipahami bahwa Pegadaian yang dilakukan oleh para pegadai dan penerima gadai di Jabiren pengambilan manfaat atau hasil dari gadai kebun karet tidak membutuhkan biaya pemeliharaan karena sudah lumayan hasil yang di dapatkan dari kebun karet yang digadai.

- g. Hasil kebun karet yang diambil manfaatnya oleh penerima gadai.

Berdasarkan wawancara dengan bapak AGN seorang pegadai (*rahin*) ia mengatakan:

*Aku marasa rugi gawi uloh je narima sanda gawi ewen manduan urah ah bara hasil kabun gita te je nyanda kuh te. Tapi aku dy ulih narai-narai gawi adat kebiasaan je manalua uluh manduan hasil kabun gita*

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan Ibu IL (*murtahin*) , di Jabiren, Selasa 25 september 2018 pukul 14.00

*kala palepah ah gawi panarima sanda je jadi sama kilau ie ih tempu hinday.*

Terjemah:

Saya merasa dirugikan oleh penerima gadai karena mereka memanfaatkan semua dari hasil kebun karet yang saya gadaikan. Kendati pun saya tidak bisa berbuat apa-apa karena adat kebiasaan yang membolehkan pemanfaatan hasil kebun karet yang diambil sepenuhnya oleh penerima gadai yang mana sudah seperti perpindahan hak milik.<sup>93</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan dengan narasumber dan dikaitkan dengan teori yang ada bahwa pemanfaatan barang gadai di lihat dari beberapa Hadist dan ayat-ayat Al-qur'an mengenai gadai dapat disimpulkan bahwa gadai kebun karet yang dilakukan tidak diperbolehkan dalam Islam karena dalam pengambilan dari hasil kebun karet keuntungannya mencapai dua atau tiga kali lipat dari piutang yang diberikan. Sedangkan dalam hadist sudah jelaskan bahwa utang yang memperoleh keuntungan adalah riba hukumnya. Sedangkan yang dapat dipahami bahwa Pegadaian yang dilakukan oleh para pegadai di Jabiren merasa dirugikan dari gadai kebun karet karena semua hasil dari kebun karet yang digadaikan di ambil sepenuhnya oleh penerima gadai (*murtahin*).

- h. Tanggapan para pegadai setelah megadaikan kebun karet apakah mempengaruhi terhadap ekonomi keluarganya

Berdasarkan wawancara dengan bapak AJ seorang pegadai (*rahin*) ia mengatakan:

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan Bapak AGN (*rahin*) , di Jabiren, Senin 24 september 2018 pukul 10.00.

*Saharus ah ewen je narima sanda dy hinday mahapan system je kilau jite dan ayo itah mananah kelakuan saling duhup manduhup jadi dy marugi kula, harapan ikey dengan pemerintah jaka tau payah keadaan masyarakat je penda toh dan jaka tau te pendeng kare lembaga penggadaian je teu nampayah masyarakat je arti nah amun masyarakat perlu biaya capat tau minjam dy minjam dengan uloh narima sanda je puna samata-mata mangau kauntung ah ih dengan mangguna hasil barang sanda.*

Terjemah:

Seharusnya para penerima gadai tidak lagi menerapkan sistem seperti ini dan marilah kita menanamkan tolong menolong sehingga tidak merugikan satu sama lain, serta harapan kami kepada pemerintah agar perhatikan keadaan masyarakat yang dibawah dan kalau bisa dirikan lah berupa suatu lembaga pegadaiaian yang bisa memperhatikan masyarakat artinya ketika masyarakat membutuhkan biaya cepat bisa terpenuhi dengan pinjaman yang tidak lagi ke para penerima gadai yang semata-mata mencari keuntungan dan memanfaatkan hasil barang jaminan.<sup>94</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan dengan narasumber dapat dipahami bahwa Pegadaian yang dilakukan oleh para pegadai di Jabiren berharap agar ada lembaga gadai yang dapat membantu pada saat yang dibutuhkan tanpa semata-mata mencari keuntungan dan memanfaatkan hasil barang jaminan.

- i. Tanggapan mengenai pelaksanaan gadai kebun karet yang di terapkan sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan wawancara dengan bapak BMN seorang penerima gadai (*murtahin*) ia mengatakan :

*Tawa kea tau en dy dalam sanda te je duan kaguna ah*

terjemah:

---

<sup>94</sup> Wawancara dengan Bapak AJ (*rahin*) , di Jabiren, Selasa 25 september 2018 pukul 13.00.

Samar-samar apakah boleh atau tidak dalam gadai yang diambil manfaatnya.<sup>95</sup>

Selanjutnya Berdasarkan wawancara dengan bapak KN seorang pegadai (*rahin*) ia mengatakan:

Dy sesuai gawi sanda je gawi marugi uloh je manyanda gawi uras duan kaguna gawi je narima sanda

Terjemah:

Tidak sesuai, karena gadai yang dilakukan merugikan penggadai karena seluruhnya diambil manfaatnya oleh penerima gadai.<sup>96</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan dengan narasumber dan di kaitkan dengan teori bahwa pelaksanaan gadai (*rahn*) harus sesuai rukun dan syarat yang sudah ditentukan dalam akad *rahn* tersebut. Sedangkan dapat dipahami bahwa Pegadaian yang dilakukan oleh para pegadai dan penerima gadai di Jabiren tidak mengetahui tata cara pelaksanaan akad *rahn* yang sudah ditetapkan dan juga tidak mengetahui tentang gadai yang bisa atau tidak diambil manfaatnya kebanyakan berkata tidak sesuai syariat Islam karena merugikan salah satu pihak.

Tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan gadai yang dilakukan di Desa Jabiren

Berdasarkan wawancara dengan bapak AR (*infoman*) ia mengatakan :

*Je sepengatawan kuh pelaksanaan sanda je terjadi melai Jabiren toh amun oluh je manarima sanda kabun gita te berhak manduan hasil*

---

<sup>95</sup> Wawancara dengan Bapak BMN (*murtahin*) , di Jabiren, minggu 23 september 2018 pukul 11.00

<sup>96</sup> Wawancara dengan Bapak KN, di Jabiren, minggu 23 september 2018 pukul 10.00

*kala palepah ah salama utang hinder bayar oloh je butang atau uloh je manyanda. Je pahaman kuh kea amun hal je kilau kute jadi biasa kuan oluh lewu Jabiren je amun uloh je manarima sanda berhak manduan hasil bara kabun gita te. Dan je tampayah ku kea je uloh je manyanda te memang rugi bara pelaksanaan akad je kilau te, tapi mau dy mau ih gawi mungkin pas jite uloh je manyanda puna perlu duit dalam waktu capat, jadi ie manyanda kabun gita ah, dan gawi kebiasaan je manampa oluh je manyanda dy tau narai-narai meski katawa ie marasa rugi.*

Terjemah :

Sepengetahuan saya pelaksanaan gadai yang terjadi di desa jabiren ini kalau orang yang menerima gadai kebun karet berhak memanfaatkan hasil sepenuhnya selama hutang belum dibayar oleh pegadai. Dan saya pahami juga kalau hal yang seperti ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Jabiren dimana orang yang menerima gadai berhak mengambil manfaat dari hasil kebun karet itu. Dan saya lihat si pegadai memang dirugikan dari pelaksanaan akad seperti itu, akan tetapi mau gimana lagi pada saat itu si pegadai memang membutuhkan uang dalam waktu cepat, sehingga dia menggadaikan kebun karetnya, dan adat kebiasaan yang membuat si pegadai tidak bisa berbuat apa-apa meskipun dia merasakan dirugikan.<sup>97</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan dengan *informan* dapat dipahami bahwa pelaksanaan gadai kebun karet yang ada di Jabiren memang tidak sesuai dengan syariat Islam dimana hasil kebun karet yang dimanfaatkan oleh *murtahin* diambil sepenuhnya, sedangkan sudah jelas dalam hadist kalau mengambil manfaat dari barang gadai hukumnya *riba*. Dan juga permasalahan di Desa Jabiren yaitu membiasakan adat yang tidak sesuai dengan syariat Islam yaitu pada pelaksanaan gadai dimana adat kebiasaan yang membenarkan kalau penerima gadai berhak mengambil manfaat dari hasil kebun karet yang digadaikan. Sebenarnya sudah jelas kalau pelaksanaan gadai (*rahn*) dalam Islam kalau akad *rahn* terjadi karena ada orang yang membutuhkan uang dan menjadikan barang

---

<sup>97</sup> Wawancara dengan Bapak AR (*informan*) , di Jabiren, rabu 27 september 2018 pukul 11.00



yang bernilai atau berharga dijadikan jaminan oleh *rahin* untuk mendapatkan uang dari *murtahin*. Sedangkan untuk *murtahin* sendiri hanya menjadikan barang jaminan sebagai titipan atau penguat dari hutang yang dilakukan *rahin*.

## 2. Akad Perjanjian Gadai Kebun Karet pada Masyarakat Jabiren Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau

Proses akad gadai yang terjadi dimasyarakat desa jabiren

berdasarkan wawancara dengan bapak BMN seorang penerima gadai

(*murtahin*) ia mengatakan :

*Akad je hapan Cuma lewat pander ih dan je katawang ku uras akad je hapan masyarakat uras hapan pander ih gawi aku percaya uloh je ba akad dengan kuh dan ie percaya dengang kuh. Sadang je perlu pas akad gin uloh je manarima sanda, je manarima sanda dan katawan kabun gita je akan nyanda nah.*

Terjemah:

Akad yang terjadi secara lisan dan sepengetahuan saya setiap akad yang di lakukan masyarakat dilakukan secara lisan karena saya percaya orang yang berakad dengan saya dan sebaliknya dia juga percaya kepada si saya. sedangkan yang di butuhkan saat berakad gadai yaitu orang yang menggadai (*rahin*), penerima gadai (*murtahin*) dan mengetahui kebun karet (*marhun*) yang ingin di gadaikan tersebut.

Selanjutnya Berdasarkan wawancara dengan bapak KN seorang pegadai (*rahin*) ia mengatakan:

*Pas aku manyanda kabun gita bihin gin lewat pander ih dan syarat je hapan gin sesuai dengan kebiasaan je gawi masyarakat bahut ih tapi aku marasa rugi pang bara akad jite ta lapas bara duit je narima ku sanda je gawi kuh pas jite gawi aku puna perlu ih pas jite. Tapi pas jite ikey manggawi akad suka rela ih gawi puna perlu duit dan ie maminjam duit ah.*

Terjemah:



Saat saya menggadaikan kebun karet dulu secara lisan dan syarat yang digunakan sesuai dengan kebiasaan yang terjadi di masyarakat pada umumnya akan tetapi saya merasakan dirugikan dari akad ini terlepas dari uang yang di terima dari gadai yang saya lakukan karena saat itu saya melakukan gadai tersebut karena saya memang memerlukan kala itu. Akan tetapi juga saya itu kami melakukan akad secara suka rela karena saat membutuhkan uang dan dia meminjamkan uangnya.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan dengan narasumber dan dikaitkan dengan teori tentang rukun dan syarat gadai *Rahn* dimana sudah ada *rahin*, *murtahin*, *marhun*, *mahrin bih* dan sudah dilakukan *ijab qabul* antara *rahin* dan *murtahin* dan sudah ada penyerahan *marhun* pada saat *ijab qabul* maka dapat dipahami bahwa Pegadaian yang dilakukan oleh para pegadai dan penerima gadai di Jabiren akad gadai yang dilakukan pada saat *ijab qabul* sudah sesuai dengan rukun dan syarat yang ada dalam akad *rahn* akan tetapi pada pelaksanaan akad yang terjadi penggadai (*rahin*) merasa dirugikan karena kebun karet yang di manfaatkan sepenuhnya oleh penerima gadai (*murtahin*).

### **3. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap penerapan dan pelaksanaan Gadai Kebun Karet pada Masyarakat Jabiren Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau.**

Islam adalah agama yang sempurna yang memuat berbagai persoalan kehidupan manusia, baik diungkapkan secara global maupun secara rinci. Ajaran Islam yang mengatur perilaku manusia, baik dalam kaitanya sebagai makhluk dengan tuhan-Nya maupun dalam kaitannya sebagai makhluk, dalam *fiqh* atau *ushul al-fiqh* disebut dengan *Syari'ah*. Sesuai dengan aspek yang diaturnya, *Syari'ah* ini terbagi kepada dua, yakni : *Ibadah* dan *Muamalah*.

*Ibadah* adalah *Syari'ah* yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan-Nya, sedangkan *muamalah* adalah *Syari'ah* yang mengatur hubungan antar sesama manusia. Pada gilirannya, kegiatan ekonomi sebagai salah satu bentuk dari hubungan antara sesama manusia, ia bukan merupakan bagian dari *aqidah*, *akhlak*, dan *ibadah*, melainkan bagian integral dari *muamalah*. Namun demikian, masalah ekonomi tidak lepas sama sekali dari aspek *aqidah*, *akhlak*, maupun *ibadah*, sebab menurut perspektif Islam perilaku ekonomi harus selalu diwarnai oleh nilai-nilai *aqidah*, *akhlak*, dan *ibadah*<sup>98</sup>. Istilah ekonomi yang berasal dari bahasa Yunani Kuno (*Greek*) berarti 'mengatur urusan rumah tangga'. Menurut istilah pakar ekonomi, ekonomi adalah usaha untuk mendapatkan dan mengatur harta baik material maupun non-material untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia baik secara individu maupun kolektif, yang menyangkut perolehan, pendistribusian ataupun penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidup.<sup>99</sup>

Hasil dari observasi penulis di lapangan terhadap gadai yang dilaksanakan para pegadai di Jabiren yang mereka buat selaku penerima gadai dengan cara barang jaminan kebun karet mereka kuasai sepenuhnya, artinya hasil dari jaminan kebun karet mereka ambil layaknya milik sendiri atau sudah dijual selama hutang si pegadai belum lunas. dalam pembayaran piutang si pegadai membayar tetap sebanyak piutangnya tanpa ada pengurangan

---

<sup>98</sup> A. Djazuli, Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat* ( Sebuah Pengenalan), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Ed. 1, Cet. ke-1, h. 17-1

<sup>99</sup> Taqiyuddin al-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, Surabaya: Risalah Gusti, 1999. h. 47.

sedikitpun, sementara hasil kebun karet yang mereka jamin diambil oleh penerima gadai sepenuhnya, padahal kalau dihitung-hitung hasilnya melebihi dari hutang si pegadai karena tidak ada batas waktu. Dalam pegadaian harus ditentukan waktunya sehingga tidak saling merugikan dan sama-sama ridho. Dalam pengambilan manfaat atau hasil barang yang digadaikan, dalam pandangan Ekonomi Islam atau pendapat para ulama berbeda pendapat, diantaranya:

Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemilik barang maupun oleh pegadai, kecuali apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Sebab hak pemilik barang tidak memiliki secara sempurna yang memungkinkan ia melakukan perbuatan hukum, misalnya mewakafkan, menjual dan sebagainya sewaktu-waktu atas barang miliknya itu; sedangkan hak penggadai terhadap barang gadai hanya pada keadaan atau sifat kebendaanya yang mempunyai nilai, tetapi tidak pada pengguna dan pemanfaatan atau pemungutan hasinya.<sup>100</sup>

a. *Rahin* Memanfaatkan *Marhun*

Syafi'iyah berpendapat bahwa *rahin* dibolehkan untuk memanfaatkan barang jika tidak menyebabkan *borg* berkurang, tidak perlu meminta izin, seperti mengendarainya, menempatnya dan lain-lain. Akan tetapi jika menyebabkan barang berkurang, seperti sawah, kebun, *rahn* harus meminta izin pada *murtahin*.<sup>101</sup> Ulama Syafi'iyah membolehkan pemanfaatan barang gadai sepanjang pemanfaatannya itu tidak

<sup>100</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*,... h.124.

<sup>101</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syari'ah di Indonesia*,... h. 93.

membahayakan *marhun*.<sup>102</sup> bahwa yang mempunyai hak atas manfaat harta benda gadai (*marhun*) adalah pemberi gadai (*rahin*) walaupun *marhun* itu berada dibawah kekuasaan penerima gadai (*murtahin*).<sup>103</sup> Kebolehan ini berdasarkan dalil hukum bahwa manfaat dan hasil dari barang gadai tersebut adalah milik *rahin* dan tidak bisa dikaitkan dengan hutang yang ditanggungnya. Berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرُّهُ نَافِقًا زَلَبُنُ اللَّحْمَ يُشْرَبُ  
بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرُّهُ نَافِقًا زَلَبُنُ اللَّحْمَ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ.  
(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Rasulullah saw.pernah bersabda: “punggung hewan yang digadaikan boleh dinaiki dengan membayar, dan susu binatang ternak boleh diminum dengan membayar bilamana binatang digadaikan. Dan bagi orang yang menaiki dan meminumnya wajib membayar”. (HR.Bukhari).<sup>104</sup>

Ulama Hanabilah mempunyai pendapat: *rahin* tidak berhak memanfaatkan *marhun* yang masih dalam perjanjian tanpa seizin *murtahin*. Ketika *rahin* dan *murtahin* tidak mencapai kesepakatan dalam penentuan batas-batas kebolehan pemanfaatan, maka barang gadai harus dibiarkan karena merupakan barang yang tertahan dari pemanfaatan sampai *rahin* melunasi hutangnya. Pandangan Ulama Hanabilah dimaksud,

<sup>102</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*,... h. 31

<sup>103</sup> Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*,... h. 333.

<sup>104</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*,... , 2011. h,235.

berdasarkan paradigma bahwa barang gadaian dan seluruh manfaatnya adalah harta yang tertahan (*mahbusah*).

Ulama Malikiyah mempunyai pendapat tentang pelarangan pemanfaatan barang gadai oleh *rahin*, bahkan walaupun pihak *murtahin* mengizinkan pemanfaatan barang gadaian maka status hukumnya tetap dilarang. Apabila *murtahin* memberi izin pada *rahin* untuk pemanfaatan barang gadai maka menurut mereka akad gadai batal karena tidak memenuhi kondisi penahanan terhadap barang gadai. Selain itu, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *rahin* selaku pihak yang menggadaikan barang, ia tidak boleh memanfaatkan barang gadai (*marhun*), mereka melarang pemanfaatan seperti ini karena hak menahan *marhun* berada pada pihak *murtahin* sehingga ia memiliki hak yang tetap sampai akad *rahn* itu berakhir. Jadi, ketika *rahin* memanfaatkan *marhun* tanpa seizin *murtahin* berarti ia telah melakukan perbuatan yang melawan hukum (*ghashab*).<sup>105</sup> Begitu pula *murtahin* tidak boleh memanfaatkan tanpa seizin *rahin*. Alasannya hadis Nabi Muhammad SAW. Sebagai berikut.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرُّهُ نَا زَلَبُنُ اللَّيْلِ يُشْرَبُ  
بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرُّهُ نَا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ.  
(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Rasulullah saw.pernah bersada:

<sup>105</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*,... h. 31-32



“punggung hewan yang digadaikan boleh dinaiki dengan membayar, dan susu binatang ternak boleh diminum dengan membayar bilamana binatang digadaikan. Dan bagi orang yang menaiki dan meminumnya wajib membayar”. (HR.Bukhari).<sup>106</sup>

#### b. Murtahin Memanfaatkan Marhun

Apabila *rahin* sebagai pemilik *marhun*, maka *murtahin* sebagai pihak yang berhak menahan *marhun* untuk jaminan hutang *rahin*. Dalam akad perjanjian *rahn* menurut kebanyakan ulama disyaratkan oleh adanya *rahin* yang menyerahkan *marhun* kepada *murtahin*. Penyerahan *marhun* merupakan salah satu syarat dari akad *rahn*, sehingga ketika seorang menggadaikan suatu barang, tetapi ia membatalkannya, sebab gadaian yang belum ada penerimaan merupakan akad yang jaiz (boleh diubah), oleh karena itu, ia boleh menarik kembali akad gadaian, sebagaimana khiyar dalam jual beli. Pada kondisi seperti hal dimaksud, barang gadai berada ditangan *murtahin* hanya berhak menahan, tetapi bukan memilikinya. Karena itu, bagaimana status pemanfaatan yang harus dilakukan terhadap barang gadai ? pada permasalahan ini, para ulama berbeda pendapat dalam hal *murtahin* yang memanfaatkan harta gadai. Perbedaan yang dimaksud, dikemukakan sebagai berikut:

Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan, baik mengendarai, mengambil susu binatang ternak dan lain sebagainya, kecuali atas izin *rahin*. Apabila hal itu dilakukan oleh *murtahin*,

---

<sup>106</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Bukhari*,... h. 183.



status hukumnya seperti orang *ghashab*<sup>107</sup>. Namun, bila *rahin* mengizinkan *murtahin* memanfaatkan harta gadai maka ulama Hanafiyah membaginya menjadi 2 (dua) pendapat, yaitu:

1. Membolehkan secara mutlak, dan
3. Mensyaratkan sebagai salah satu syarat yang tercantum dalam akad sehingga *murtahin* dapat memanfaatkan *marhun*. Namun, hal itu dapat menjerumuskan pada *riba*.<sup>108</sup>

Jika disyaratkan ketika akad untuk memanfaatkan *marhun* hukumnya haram sebab termasuk *riba*.<sup>109</sup> sebagaimana hadits Nabi Muhammad saw.

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً رِبَاً (رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَسَا مَةَ).

“Dari Ali ra., berkata: Nabi SAW bersabda: semua pinjaman yang menarik manfaat adalah *riba*.” (HR. Harits bin Usamah)<sup>110</sup>

Ulama malikiyah berpendapat mengenai status hukum pemanfaatan yang dilakukan oleh *murtahin* atas *marhun* menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

- (a) dalam hutang yang bersifat *qard*, (b) dalam hutang piutang yang bersifat jual beli atau transaksi *mu'awwadah* (pertukaran). Dalam bentuk pertama ulama Malikiyah melarang segala bentuk pemanfaatan *murtahin* atas *marhun* walaupun hal itu merupakan *tabarru'* dari *rahin* kepada *murtahin*.

<sup>107</sup> *Ghashab* adalah mengambil sesuatu secara paksa dan terang-terangan.

<sup>108</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*,... h. 35

<sup>109</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*,... h. 174

<sup>110</sup> Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*,... h. 495.

Ulama Syafi'iyah secara umum berpendapat seperti pendapat Ulama Malikiyah, yaitu pemanfaatan yang dilakukan oleh *murtahin* atas *marhun* itu tidak dibolehkan. Karena itu, jika *murtahin* mensyaratkan pemanfaatan *marhun* dalam akad *rahn* yang didasarkan pada akad *qord* maka syarattersebut menjadi batal, demikian pula akad pegadaannya, karena itu dapat membahayakan kepentingan *rahn*.

Bagi ulama Hanabilah pemanfaatan atas barang gadai harus dipisahkan antara benda mati dan benda hidup (hewan). Kalau *marhun* berupa barang-barang selain hewan yang tidak diperlukan biaya pemeliharaan seperti rumah, perhiasan, dan lain-lain, maka *murtahin* dilarang memanfaatkan barang-barang tersebut tanpa seizin *rahn*. Namun, bila ada izin dari *rahn*, dalam pengertian gadai itu merupakan harga barang jualan, atau sewa rumah maka hal itu diperbolehkan oleh ulama Hanabilah. Lain halnya dalam perjanjian gadai hewan ternak atau tunggangan, maka ulama Hanabilah *murtahin* boleh mengambil manfaatnya yang seimbang atau yang sepadandengan nafkah yang dikeluarkan untuk merawat atau memelihara *marhun*, walaupun *rahn* tidak mengizinkannya. Pendapat mereka dalam hal dimaksud, berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw:

"Kendaraan dapat digunakan dan hewan ternak dapat diambil manfaatnya apabila digadaikan". (H.R. Ibnu Majah).<sup>111</sup>

Hadis diatas menjelaskan bahwa bagi yang memelihara barang gadai, maka ia boleh mengambil manfaat dari barang gadai tersebut sesuai

---

<sup>111</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Bukhari*, .... h. 419.

dengan biaya yang ia keluarkan.<sup>112</sup> Lain halnya pendapat Sayyid Sabiq, akad gadai bertujuan untuk meminta kepercayaan dan menjamin hutang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Tindakan memanfaatkan barang adalah tak ubahnya seperti *qiradh*, dan setiap bentuk *qiradh* yang mengalir manfaat adalah riba.<sup>113</sup>

Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun *rahin* mengizinkannya, karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba<sup>114</sup>.

Dari beberapa pendapat ulama yang di ungkapkan diatas, mempunyai hukum dasar yang sama. Namun mempunyai penafsiran yang berbeda. Oleh karena itu, penulis mempunyai pendapat, tetap menjadikan dasar pada hadis yang dikemukakan oleh para ulama, yaitu fungsi barang gadai (*marhun*) sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai (*murtahin*) barang tersebut dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*). Namun, harus ada izin dari (*rahin*), berkaitan dengan pengambilan manfaat atau hasil dari barang jaminan kebun karet yang digadaikan oleh para pegadai di Jabiren boleh diambil supaya tidak mubazir (tidak produktif) dan mengenai hasilnya dapat dibagi antara pemilik dan pegadai, atas kesepakatan bersama. Ada satu hal yang amat penting diingat, bahwa hasilnya tidak boleh menjadi hak sepenuhnya pegadai dan penerima gadai. Dalam masalah ini tidak terlepas dari

---

<sup>112</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*,... h. 35-36.

<sup>113</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syari'ah di Indonesia*,... h. 94

<sup>114</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,... h. 108.

prinsip tolong-menolong dan saling pengertian antara pegadai dengan penerima gadai. Namun, perjanjian yang dibuat oleh si pegadai dan penerima gadai di Jabiren tidak adanya batas waktu, dalam pengambilan manfaat atau hasil dari jaminan kebun karet tidak pernah ada konfirmasi seberapa pendapatan terhadap si pegadai dan bahkan dalam pengambilan pemanfaatan atau hasil kebun karet tidak sesuai dengan seharusnya seperti dikala hari hujan masih mereka memanfaatkan padahal itu sangat berdampak negatif (tidak produktif) terhadap kebun tersebut dan kurangnya perawatan dari si penerima gadai, dengan demikian merugikan sepihak.

Berdasarkan atas ketentuan tersebut dalam adat istiadat atau kebiasaan bahwa pemegang barang jaminan gadai berhak mengambil hasil kebun karet yang sedang menjadi tanggungan utang, dan semua hasilnya menjadi hak pemegang barang gadai sendiri, menurut ketentuan Ekonomi Islam tidak dapat dibenarkan, dan tidak boleh sebab berakibat kerugian pada pihak orang yang menyerahkan barang gadai (pemilik barang), yang sebagai pemilik tidak ikut menikmati hasil miliknya sendiri yang dikerjakan orang lain pengambilan manfaat barang gadai yang mengeluarkan hasil oleh pemegang barang gadai serupa itu dapat dipandang mengandung unsur-unsur semacam eksploitasi oleh pihak kuat terhadap pihak lemah, oleh pihak kaya terhadap pihak miskin. Karena pada dasarnya yang berhak memungut hasil atau manfaat barang gadai adalah orang yang menyerahkan barang gadai dalam kedudukan sebagai pemilik, maka ia juga lah yang memikul biaya pemeliharaannya

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian Pelaksanaan Gadai Kebun Karet Pada Masyarakat Jabiren Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Menurut Pandangan Ekonomi Islam, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Gadai Kebun Karet Pada Masyarakat Jabiren Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau yang dominan di jadikan sebagai agunan jaminan adalah kebun karet. Jaminan kebun karet tersebut dimanfaatkan atau di ambil hasilnya oleh si penerima gadai selama hutang pegadai belum dilunasi dengan jangka waktu yang tidak dibatasi.
2. Akad yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan syarat yang sudah ditentukan dalam akad *Rahn* akad tetepi pada saat prakteknya penggadai (*rahin*) merasakan dirugikan karena semua hasil kebun karet diambil sepenuhnya oleh penerima gadai (*murtahin*)
3. Menurut Ekonomi Islam pengambilan hasil atau manfaat barang jaminan kebun Karet sebahagian ulama membolehkan, sesuai dari fungsi barang gadai (*marhun*) sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai (*murtahin*) barang tersebut. Menurut ulama Ulama Syafi'iyah membolehkan pemanfaatan barang gadai sepanjang pemanfaatannya itu tidak membahayakan *marhun*. *Marhun* juga dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*). Namun, harus ada izin dari (*rahin*), disyaratkan

ketika akad, dan ditentukan waktunya apabila tidak ditentukan maka menjadi batal.

Adapun jumhur *fuqaha* berpendapat penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai. Karena, perjanjian yang dibuat oleh si pegadai dan penerima gadai Jabiren dalam pengambilan manfaat yang diambil sepenuhnya oleh *murtahin*. dengan demikian merugikan sepihak dalam hal ini pandangan ekonomi Islam tidak boleh.

## B. Saran

Dari kesimpulan diatas dan wawancara penulis dengan responden dilapangan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada para pegadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) saling memahami gadai yang sesuai dengan syariat Islam sehingga tidak saling merugikan dan melakukan gadai saling ridho.
2. Bagi pegadai dan penerima gadai dalam akad ditentukan waktunya. Sehingga tidak ada yang dirugikan.
3. Sebaiknya bagi penerima gadai hasil yang diperoleh itu diperhitungkan dan dikeluarkan seberapa bagian untuk si pegadai dan untuk penerima gadai sehingga tidak lagi merugikan sepihak dan bahkan si pegadai dengan adanya sistim seperti demikian bisa lebih terbantu dan bisa mencicil piutangnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, Semarang: Pustaka Nuun, 2011
- Al-Nabhani Taqiyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif* , Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Ali M. Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam ( Fiqh Muamalat )*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Ali Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Arikunto Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003.
- Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Firdaus Muhammad dkk, *Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah*, Jakarta: Renaisans. 2005.
- Ghazali Imam masykur, dkk, *Al Mumayyaz (Al-qur'an Tajwid)*, Bandung: Cipta Bagus Segara, 2013.
- Ghofu Abdul r Anshori, *Gadai Syari'ah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Ghony M. Djunaidi & Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. I, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Hasan M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Huda Qomarul, *Fiqh Mu'amalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Huda Nurul dan Mohammad Heykal , *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta : Kencana 2010.
- Indri, *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Kencana, 2015

- J Moleong Lexy., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Karim Adiwarman , *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta: Univertas Indonesia Press, 1999
- Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Nashiruddin Muhammad, al-Albani, *Shahih Bukhari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2007.
- Nasution, *Metodologi Research (penelitian ilmiah)*, Bandung: Bumi Aksara, 20014.
- Praswoto Andi, *Mengusai Teknik-teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Diva Press, 2010.
- Rais Salsi, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasiona*, Jakarta: UIN, 2005.
- Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015.
- Sobagyo Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Soemitra Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* cet. 6, Bandung: Alfabet, 2010.
- Sogiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suhendi Hendi, *fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Suwiknyo Dwi, *Kompilasi Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Syafe'i Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2004.
- Syafi'i Muhammad Antonio, *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendikiawan*, Jakarta: Tazkia Institute, 2001.

Syukur Abdullah, *Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan*, Persadi, Ujung Pandang. 1987.

T Yanggo Chuzaimah dan Hafiz Anshari, *Problematisa Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: LSIK, 1997

Usman Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Yin Robert K., *Studi Kasus desain & Metode*, Terj. M. Faudzi Mudzakir, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Zuhdi Masjufuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997.

## **B. Skripsi**

Amalia Hidayati Dina, "Pemanfaatan Gadai Tanah Sawah di Desa Sruwen Kec. Tenganan, Kab. Semarang Menurut Hukum Islam" Skripsi

Astarina Desi, "Penerapan Akad Rahn Dalam Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah Di Kota Palangka Raya," Skripsi

Munir, "PRAKTEK GADAI SAWAH DAN IMPLIKASI SOSIAL EKONOMI (Studi Kasus di Desa Juruan Daya Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep Madura)" Skripsi

Mutawaddiah, "Pelaksanaan Gadai Tanah dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Bajiminasa Bulukumba" Skripsi

Riko Rahman, Praktek "*Manyanda*" kebun karet Masyarakat Bakumpai Di Desa Muara Sumpoi Ditinjau dalam Ekonomi Islam", Skripsi.

## **C. Internet**

<http://hidayatugp.blogspot.com/2015/08/analisis-pandangan-islamterhadap.html?m=1> (di akses tanggal 25 september 2018 pukul 19:00)

<http://juranmakalah.blogspot.co.id/2013/06/gadai-Islami.html?m=1> (di akses 21 Januari 2018, pukul 20:00 )

<http://putralmbk.blogspot.com/2008/07/konsep-rahn-dalam-islam-implementasi.html?m=1> (di akses tanggal 26 september 2018 pukul 20:15).

<http://zezameirisenthia90.blogspot.com/2016/06/makalah-fiqh-muamalah-gadai-rahn.html?m=1> (di akses Tanggal 27 agustus 2018 pukul 09:30).